

**KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PROBOLINGGO PADA
ZAMAN KOLONIAL BELANDA 1918-1942**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



Oleh:
Amam Swardi
NIM: 201104040003
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

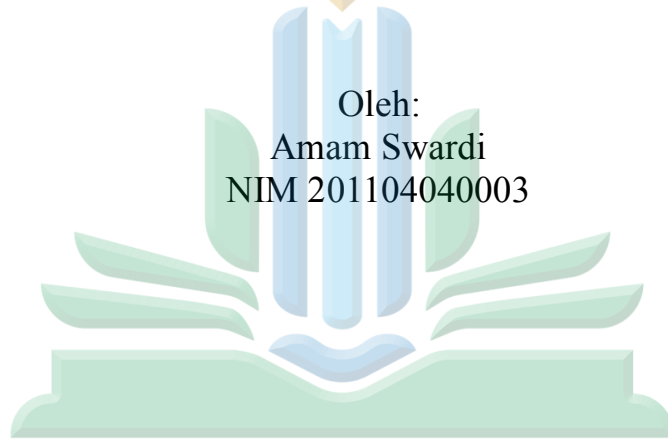
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2024**

**KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PROBOLINGGO PADA
ZAMAN KOLONIAL BELANDA 1918-1942**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh:
Amam Swardi
NIM 201104040003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A.
NiP. 199005282018011001

**KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PROBOLINGGO PADA
ZAMAN KOLONIAL BELANDA 1918-1942**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam


Hari: Kamis

Tanggal: 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Abdulloh Dardum, M. Th. I.

NIP. 198707172019031006


Sitti Zulfaiha, M.A.

NIP 198908202019032011

Anggota:

1. Dr. Aslam Sa'ad M. Ag.



2. Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A.

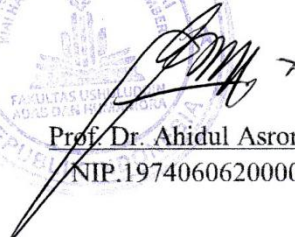


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora


Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag.

NIP.197406062000031003

MOTO

Dari tulisan Pram di buku yang berjudul Bumi Manusia “seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan
Untuk Kedua Orang Tua serta
Kepada Almamater Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kepada Yang Maha Esa, karena telah memberikan ruang hidup berupa nikmat dan rahmat. Sekaligus ucapan terimakasih kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi sosok revolusioner dan sekaligus pembawa pesan pembebasan atas segala bentuk penindasan di tanah Arab serta dunia. Sehingga penulis masih dapat merasakan hasil serta nilai perjuangan sang baginda di hari sekarang, lantas menjadi motivasi penulis untuk ikut berjuang melawan kemalasan saat proses penyusunan skripsi.

Selesainya kepenulisan skripsi yang berjudul “KONDISI SOSIAL EKONOMI DI PROBOLINGGO PADA ZAMAN KOLONIAL BELANDA 1918-1942”, dengan kesadaran penuh karena peran dari beberapa pihak. Maka dari itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua dengan bentuk kasih sayang, dorongan, do'a, finansial, dan segalanya, hingga penulis masih dapat melanjutkan proses penyusunan skripsi.
2. Rektor Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Hepni. S. Ag. M.M. CPEM. Untuk kepemimpinannya sehingga penulis dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag. Dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas

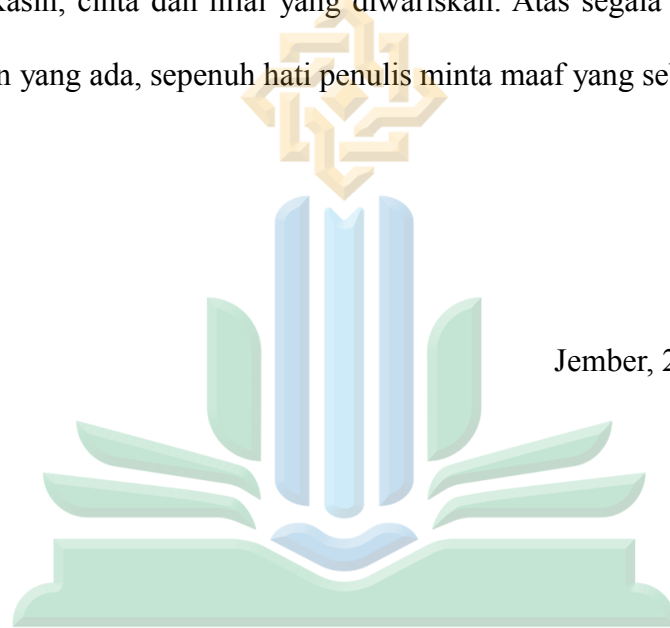
Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember Dr. Win Ushuluddin, M. Hum. Atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
5. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S. Ag., M. Pd. Atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
6. Dosen Pembimbing Mawardi Purbo Sanjaya, M. Hum. Yang selalu memberikan motivasi dan menyakinkan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat dan sangat membantu penulis mulai awal kuliah sampai dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Angkatan 20 Sejarah dan Peradaban Islam telah menjadi teman dan sering membantu dalam bentuk apapun termasuk diskusi, sehingga kepenulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Saudara yang berwujud teman-teman dekat seperti Bayu Alamsya, Fais Assya'di, dan Moh. Iskandar Zulqornain. Sebab keberadaannya selalu

mendukung, dan kadang-kadang rela melakukan apapun untuk tetap semangat hingga skripsi ini selesai.

10. Diena Safiera Hardianti sebagai orang terdekat, yang muncul ketika proses penyusunan skripsi hampir selesai.

Ucapan ini bentuk keinsafan dan rasa sukur untuk segala bentuk dukungan, perhatian, kasih, cinta dan nilai yang diwariskan. Atas segala kekuarangan serta keterbatasan yang ada, sepenuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.



Jember, 23 September 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Amam Swardi. 2024. *Kondisi Sosial Ekonomi di Probolinggo Pada Zaman Kolonial Belanda 1918-1942*.

Sejarah manusia di Hindia Belanda tidak lepas dari pergolakan ekonomi, lantas kepastian masyarakat terhadap ekonomi menjadikan arena sosial secara terstruktur didominasi oleh golongan tertentu seiring perkembangannya. Mekanisme dan perubahan produksi dari feodal sampai kapital, hanya melahirkan kelas dominan (superior) dan tertindas (inferior). Langkah-langkah produksi yang kian menjadi pesat, secara serta merta menjadikan Probolinggo sebagai daerah kantong perekonomian koloni Belanda dan borjuis swasta.

Fokus dalam penelitian ini, (1) Untuk menguraikan kondisi sosial ekonomi di Probolinggo 1918-1942. (2) Untuk menguraikan kondisi sosial ekonomi dalam infrastruktur dan suprastruktur di Probolinggo 1918-1942. Tujuan dari penelitian ini untuk menarasikan dan mendeskripsikan, bagaimana bangunan basis struktur dan suprastruktur berkerja di Probolinggo 1918-1942.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konflik kelas (Karl Marx) sosial ekonomi dengan metode penelitian sejarah; *heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi*. Sumber data primer dari penelitian ini adalah jejak produksi kapital di Probolinggo, seperti foto arsip keluarga kaya raya pemilik Pabrik Oemboel, produksi gula, rel kereta api, lokomotif, pelabuhan, perkebunan, dan lembaga non produksi seperti pemerintahan, lembaga pendidikan. Kemudian terdapat jurnal penelitian, buku dan arsip sebagai data sekunder guna mendapatkan referensi dan sekaligus menunjang dalam proses verifikasi terhadap data sekunder.

Hasil penelitian; Probolinggo pada 1918 ditunjukan bagaimana basis struktur berkerja, dengan menjadikan daerah barat sebagai jaringan suprastruktur berupa *Gemeente*, ide politik, dan lembaga institusional. Lantas model produksi kapital, juga tidak hanya meninggalkan jejak di bagian luar produksinya saja. Tetapi beberapa daerah terdapat produksi-produksi kapital milik pemodal swasta. Seperti Pabrik Oemboel yang terus-terusan melakukan produksi masal dengan mesin gula modern, penyediaan produksi berupa jasa transportasi oleh Ali penduduk lokal, dan Perusahaan Swasta yang menerima konsensi pembangunan kereta api di sepanjang rute di Probolinggo. Hingga memunculkan pola interaksi sosial yang melahirkan hubungan-hubungan kelas antara buruh pekerja dan majikan.

Kata Kunci: *Sosial, Ekonomi, Probolinggo.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Studi Terdahulu	7
G. Kerangka Konseptual.....	10
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II SEJARAH EKONOMI SOSIAL DI PROBOLINGGO PADA ZAMAN KOLONIAL BELANDA 1918-1942.....	28
A. Sosial Ekonomi Pra-Liberal Abad 19 (1839-1870)	28
B. Sosial Ekonomi Liberal Abad 19 Ahir (1970-1900) Hingga 20 Awal (1900-1942).....	32
C. Sosial Ekonomi di Probolinggo pada zaman kolonial Belanda 1918-1942...34	
BAB III KONDISI SOSIAL EKONOMI DALAM INFRASTRUKTUR DI PROBOLINGGO 1918-1942	40
A. Infrastruktur Berupa Industri	41
B. Kelas Sosial Dalam Produksi.....	52
C. Pasar (Komuditas Konsumen).....	57
BAB IV KONDISI SOSIAL EKONOMI DALAM SUPRASTRUKTUR DI PROBOLINGGO 1918-1942	60
A. Pemerintahan Kolonial dan Aktiftas Pokitiknya.....	62
B. Pendidikan Kolonial	72
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	90
BIOGRAFI PENULIS.....	91

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1.1 Sensus penduduk di kota Probolinggo.....	36
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar. 1.1 Gambar Pelabuhan Probolinggo	38
Gambar. 1.2 Gambar Gunung Bromo.....	39
Gambar. 2.1 Gambar Pabrik Gula Sumber Kareng	44
Gambar 2.2 Pabrik Gula Oemboel Kepunyaan Swasta 1910	44
Gambar 2.3 Perkebunan Tebu Miliki Perusahaan Gula.....	46
Gambar 2.4 Perjanjian antara Pemerintahan Kolonial Belanda dengan beberapa Perusahaan Swasta.....	50
Gambar 2.5 Stasiun kereta api milik Stoomtram Maatschappij (PbSM), di Probolinggo	52
Gambar 2.6 Sepasang Borjuis Johanna Bezoet de Bie dan Alexander MacNeill, Pemodal di Oemboel	54
Gambar 2.7 Gambar 3. Nyonya besar atau istri dari pemilik alat produksi di oemboe	55
Gambar. 3.1 Diklat Pegawai Negeri Sipil dan Kunjungan Siswa OSVIA Probolinggo ke Surabaya.....	71
Gambar 3.2 <i>Hollandsche Chinesseche School</i> di Probolinggo.....	73

BAB I

PEDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam sejarah Indonesia, terdapat suatu pembabakan peristiwa yang cukup berpengaruh pada aspek kehidupan masyarakat Nusantara. Salah satu dari pembabakan tersebut tidak terlepas dari periode kolonialisasi di Indonesia yang berperan banyak dalam merubah tatanan kehidupan masyarakat.¹ Kolonialisasi ini dalam beberapa penanda selalu diasosiasikan dengan kedatangan negara-negara Eropa yang melakukan kegiatan ekonomi di Nusantara, sehingga berujung kepada eksploitasi dalam skala besar.²

Proses eksploitatif di Hindia-Belanda yang terus terjadi dan terorganisir, dapat mewarnai persoalan-persoalan besar hingga pada awal abad XX. Lantas pergolakan sosial ekonomi secara bertahap menjadi indikator utama dalam menciptakan tragedi besar, atas timbulnya masalah-masalah yang merenggut hak merdeka setiap individu. Fenomena ini memang menjadi sebuah kontrol utama dalam terbentuknya suatu tatanan di Hindia Belanda, karena dominasi modal barat terhadap negara-negara lainnya merupakan sebuah keniscayaan.

Tidak hayal apabila situasi Hindia-Belanda awal abad XX menjadi arena diskursus yang menarik untuk dijadikan fokus utama dalam penelitian,

¹ Kompas, "Dampak Kolonialisme Belanda di Bidang Sosial", diakses pada 30 April 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/20/100000179/dampak-kolonialisme-belanda-di-bidang-sosial?page=all>

² Nuryadi, "Gambaran Imperialisasi dan Kolonialisasi di Pulau Jawa Abad-19 dalam Travel Writing: A Visit to Java Karya Williyam Basil Worsfold", *Jurnal DEIKIS*, Vol. 4, No. 2, (2017): 96-102.

yakni tentang suatu konstalisasi sosial ekonomi yang terjadi di bagian timur pulau Jawa yaitu kawasan Probolinggo. Karena pada dasarnya masa kolonialisasi di Hindia Belanda tidak hanya memberikan surplus perubahan di daerah-daerah besar, seperti Batavia misalnya. Sebelah timur Jawa juga mengalami perubahan-perubahan signifikan dan di antaranya yakni kawasan Probolinggo, hingga dapat memunculkan sebuah arena pertentangan antara dimensi masyarakat. Fenomena radikal semacam ini menjadi tantangan besar yang memang patut menjadi bahan diskursus berdasarkan latar sejarah tersebut, lantas kemudian penyusun ingin menjadikannya sebuah pembahasan secara ilmiah. Secara koheren dapat disimpulkan bahwasanya fenomena dan metodologi semacam ini, objek dari penelitian mengacu pada persoalan tatanan ekonomi sosial.

Alhasil peneliti berupaya membuat sebuah kerangka kajian ilmiah yang berfokus menguraikan gejala dan gerak sosial ekonomi di wilayah Probolinggo 1918-1942. Sebab pada tahun-tahun tersebut, bagian dari wilayah Probolinggo menjadi kota kecil yang berhasil memberikan surplus keuntungan untuk menjawab kalangan berkepentingan. Karena terdapat reaksi cepat antara modal terhadap potensi berlimpah di sepanjang dataran dan pesisir daerah tersebut. Hingga persoalan ini cukup disayangkan apabila hanya dibiarkan saja tanpa ada pengkajian secara ilmiah. Manakala aktifitas diskursus ilmiah dapat menjadi bahan literatur, setidaknya dapat memberikan suatu dampak reflektif.

Probolinggo merupakan wilayah dengan dua corak administrasi yakni pemerintahan kota Hindia Belanda, hal ini berdasarkan ketentuan pada tahun

1918 dan juga terdapat beberapa distrik yang tersebar di wilayah Probolinggo pada 1928. Lantas rancangan-rancangan pemerintah Hindia Belanda ini, menjadi satu arena yang sangat masif di dimensi ekonomi sosial.

Probolinggo di abad XX memiliki serangkaian epos perubahan yang cukup signifikan, dari peralihan sistem pemerintahan hingga pada bentuk mendasar, yakni sosial ekonomi di Probolinggo. Oleh karena itu untuk pengkajian lebih lanjutnya dalam skripsi ini, secara ilmiah akan dilakukan pembedahan secara mendalam berdasarkan beberapa sumber yang telah didapatkan. Konten ini juga akan menjadi bagian dari beberapa upaya untuk mengulik kejadian dan peristiwa di Hindia Belanda, sekalipun dalam penelitian ini hanya memiliki batasan temporal dan spasial tertentu.

Lantas dalam beberapa diskursus lainnya kegiatan ini juga didorong oleh hasil perkuliahan yang pernah ditempuh, bahwasanya dalam penentuan objek penelitian salah satunya harus memiliki kedekatan emosional dan intelektual. Dasar ini berangkat dari buku Pengantar Sejarah (Kuntowijoyo) yang telah diampuh di semester pertama.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi di Probolinggo pada tahun 1918-1942?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi dalam infrastruktur dan suprastruktur di Probolinggo pada tahun 1918-1942?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian, penting untuk menentukan ruang dan waktu untuk mencapai titik fokus terhadap sesuatu yang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini, bertitik fokus terhadap batas-batasan antara lain:

1. Temporal :

Penelitian ini akan memotret pada masa penjajahan Belanda di Probolinggo yang diambil sejak tahun 1918-1942 Masehi. Pada kurun waktu tersebut, terdapat sebuah peristiwa-peristiwa yang patut untuk diuraikan. Bertepatan pada tahun ini ada kerja borjuis di bagian wilayah Probolinggo, yang dimanifestasikan pada ketetapan sebagai kotamadya (*Gemeente*).³ Peneliti memilih batasan temporal tersebut, karena memiliki perhatian lebih terhadap sebuah epos penjajahan di zaman Belanda. Oleh karena itu pengambilan batasan waktu tersebut, merupakan batasan yang cukup relevan dan kontekstual di wilayah Probolinggo.

2. Spasial :

Penelitian ini akan meninjau secara husus dalam petakan wilayah Probolinggo secara keseluruhan. Wilayah ini secara geografis di awal abad 20 an, di sisi barat berbatasan langsung dengan Keresidenan Pasuruan dan wilayah timur bertengger Keresidenan Besuki. Sedangkan area utara terbentang lautan dan secara langsung terhubung dengan selat Madura.

³ Ruli Muji Astutik and Sepria Alrianingrum, “*Gemeente* Probolinggo 1918-1926”, *Jurnal AVATARA*, Vol. 1, No. 3 (Oktober, 2013): 520.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kegiatan akademis yang harus memiliki fokus penelitian, untuk mencapai sebuah sistem kerangka objektif.

Diantaranya:

1. Untuk menguraikan kondisi sosial ekonomi di Probolinggo pada tahun 1918-1942.
2. Untuk menguraikan kondisi sosial ekonomi di wilayah infrastruktur dan supstruktur di Probolinggo pada tahun 1918-1942.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian di ranah akademis biasanya selalu dirangsang dalam konteks kebermanfaatannya baik secara teoritis maupun praktis, berkaitan dengan hal tersebut, setiap penelitian memang harus memiliki dampak konkrit. Langkah ini juga sebagai parameter di ranah kebermanfaatan hasil penelitian yang dikonsumsi publik, atau secara khusus menjadi bahan kajian di lembaga yang terkait dan elemen akademisi lainnya.

1. Manfaat Teoritis

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwasanya penelitian dalam wilayah akademik mengunakan basis analisis pengkajian secara ketat dan ilmiah, oleh karena itu dalam penelitian ini akan terkandung sebuah pengkajian teoritis yang akan sangat berguna bagi individu dan kelompok. Manfaat yang dimaksud, dapat meberikan surplus wawasan kepada pihak peneliti dan pembaca dengan menambah suatu pemahaman tentan konteks penelitian, yakni tentang ekonomi sosial di Probolinggo.

Penelitian ini juga tidak terlepas dengan beberapa diskursus yang membawa beberapa kerangka teoritis, hal ini dapat memicu suatu pengujian terhadap beberapa konten teori-teori yang dapat digunakan untuk membedah suatu objek kajian. Terlebih lagi proses ini dapat menjadi ranah untuk memperoleh beberapa surplus kerangka analisis terdahulu, maka konsekuensi logis dalam proses tersebut dapat memberikan daya abstraksi kepada penyusun dan pembaca. Lebih-lebih dapat memberikan suatu kebaruan yang dapat digunakan untuk kegiatan diskursus ilmiah kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis untuk menyingkap fenomena di Probolinggo dengan sudut pandang sejarah ekonomi sosial. Maka dari itu peneliti akan mendapatkan tambahan pengetahuan serta pengalaman dalam penelitian ini, berupa pendekatan teori sosial ekonomi dan metode penelitian sejarah.

b. Bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah bahan pengkajian akademis yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Sebagaimana yang telah diinginkan oleh peneliti, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan baru, baik dalam bentuk kerangka maupun hasil dari penelitian.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember.

Harapan dari hasil penelitian ini, semoga mengangkat integritas perguruan tinggi dalam aspek literasi yang berbasis Ilmiah. Sekaligus menjadi sebuah bahan bacaan yang layak dikonsumsi oleh mahasiswa secara umum, untuk mengetahui epos sosial ekonomi Probolinggo 1918-1942.

- d. Bagi Probolinggo.

Hasil dari penelitian ini, terdapat dua harapan yang timbul di benak peneliti untuk masyarakat Probolinggo. *Pertama*, tentunya sebagai kajian akademis atau sebagai referensi dalam literatur sejarah. *Kedua*, sebagai bahan bacaan yang memberikan rangsangan untuk mengingat epos dan peristiwa di tanahnya sendiri.

F. Studi Terdahulu

Penelitian ilmiah dan lebih khususnya penulisan sejarah, selalu mengalami sebuah corak perubahan dalam segi sudut pandangnya. Mengingat perubahan yang terjadi di Probolinggo saat zaman Hindia Belanda, tentu saja banyak corak penelitian. Alhasil terdapat beberapa perbandingan yang tentu saja sangat berguna dalam penelitian ini, baik secara metodis, teori, dan informasi lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan hasil pengkajian dan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam beberapa konteks serta sekaligus perbedaannya antara lain:

Pertama, jurnal AVATARA ditulis oleh Tiyo Eka Mayshurah dan Sri Mastuti Purwaningsih yang berjudul “Perkembangan Pendidikan Kolonial di

Gemeente Probolinggo Tahun 1918-1942”. Dalam penelitian tersebut, tersampaikan bahwasanya pada rentan waktu 1918-1942 terdapat sebuah perkembangan dalam pendidikan. Dari sudut pandang tersebut, bahwasanya fasilitas pendidikan di Hindia-Belanda dan khususnya di *Gemeente Probolinggo* dibangun untuk kepentingan bangsa Belanda untuk mendapatkan pekerja dengan upah minimum.⁴

Kesamaan dalam konteks penelitian di atas dengan penelitian ini, terdapat dari beberapa aspek yakni: letak geografis yang sama-sama menekankan penelitiannya di *Gemeente Probolinggo*, dan memiliki batasan temporal yang mirip yakni antara tahun 1918-1942. Selain itu, terdapat aspek yang sangat berkaitan dan barangkali menjadi kesamaan dengan penelitian ini yakni, bahwasanya adanya pendidikan merupakan proyeksi untuk menciptakan pekerja upahan.

Adapun **perbedaannya** terletak pada fokus penelitian, penelitian ini memiliki konsentrasi dalam mengurai persoalan stratifikasi sosial di ranah pendidikan, tentunya berbeda dengan penelitian peneliti yang memiliki fokus kepada ekonomi sosial di Kota Probolinggo.

Kedua, Journal of Urban Sociology, Vol. 6 No. 1 yang ditulis oleh Tiyo Eka Masyurroh dan Abdus sair berjudul “Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda”. Dalam jurnal tersebut, penulis memiliki fokus terhadap aspek stratifikasi sosial dalam pendidikan yang berada di Probolinggo. Dalam pandangannya, adanya

⁴ Tiyo Eka Masyurroh and Sri Mastuti Purwaningsih, “Perkembangan Pendidikan Kolonial di *Gemeente Probolinggo Tahun 1918-1942*,” *jurnal AVTARA*, Vol. 11, No 2 (2021): 3-12.

pendidikan tersebut juga menggeret penduduk lokal ke arah kelas-kelas sosial. Pelajar yang diambil dari penduduk lokal, ternyata dipersiapkan untuk menjadi buruh atau sebagai pekerja dalam produksi ekonomi. Sehingga arah dari pendidikan yang diterima oleh penduduk lokal Probolinggo tidak mengarah kepada kemajuan sumber daya manusia setempat, tetapi sebagai pemenuhan atas kebutuhan tenaga kerja Kolonial Belanda dan borjuis swasta.⁵

Namun pada jurnal ini, lebih mengarah kepada stratifikasi sosial yang berada dalam pendidikan di Probolinggo pada zaman kolonial. Adapun **kesamaan** penelitian ini, dapat ditinjau dari titik fokus tentang adanya pendidikan yang tidak melulu upaya realisasi politik etis. Lebih dari fenomena tersebut, bahwasanya temuan dalam penelitian ini juga mengacu pada fungsi pendidikan yang dibuat untuk menciptakan tenaga kerja.

Sedangkan yang menjadi **pembeda** hasil pembahasan dari penelitian, dalam jurnal ini mengarah langsung pada kontalisasi sosial di pendidikan. Sedangkan dalam penelitian membahas tentang fenomena ekonomi sosial, peristiwa yang pernah mewarnai kehidupan masyarakat 1918-1942.

Ketiga, jurnal AVATARA oleh Ruli Muji Astutik dan Septia Alianingrum berjudul “*Geemente* Probolinggo 1918-1926”. Dalam jurnal tersebut, penulis memaparkan sebuah gerak dan perubahan dalam tatanah pemerintahan kolonial Belanda di Kotamadya Probolinggo.

Penetapan pemerintahan kota di bagian daerah Probolinggo terdiri beberapa indikator, salah satunya didorong oleh faktor sumber daya alam.

⁵ Tiyo Eka Masyuroh and Abdus sair, “Stratifikasi Sosial Dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda,” *Jurnal Urban Sociology*, Vol. 6, No. 1 (April 2013): 2-8.

Karena daerah ini memiliki kekayaan yang dapat meopang kebutuhan bangsa kolonial. Salah satunya yakni tidak terlepas dari faktor geografisnya yakni, sebagai wilayah *hinterland* yang subur karena adanya gunung Bromo.⁶

Adapun **kesamaannya** terletak kepada wilayah yang dibahas yakni, di wilayah administrasi otonom *Gemeente* Probolinggo. Sedangkan **perbedaan** dengan penelitian ini adalah, titik konsentrasi penyusun pada sosial ekonomi yang ada di Probolinggo. Jika demikian, penelitian terdahulu ini juga memberikan beberapa pijakan penting, salah satunya terletak pada modus kolonial yang membangun fasilitas-fasilitas tertentu tidak terlepas dari upaya untuk melakukan eksploitasi bersekala besar.

G. Kerangka Konseptual

Muatan ini membahas sebuah kajian konseptual yang akan digunakan untuk menguraikan objek yang dikaji. Maka dari itu, kajian konseptual merupakan langkah untuk merinci secara sistematis fenomena melalui konsep maupun teori yang dipakai oleh peneliti. Tetapi konsep maupun kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti, harus diuraikan secara jelas untuk menemukan titik relevansinya antara lain:

1. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan rumpun pembahasan yang sama-sama mengacu pada aktifitas manusia, namun dua disiplin keilmuan ini memiliki batas-batas tersendiri. Secara etimologi ekonomi terdiri dari dua suku kata dan berasal dari bahasa Yunani, yakni *Oikos* “Rumah tangga”

⁶ Ruli Muji Astutik and Sepria Alrianingrum, “Gemeente Probolinggo 1918-1926”, Jurnal AVATARA, Vol. 1, No. 3 (Oktober, 2013): 520-30.

dan *nomos* “Aturan”. Kemudian secara terminologi ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya kehidupan manusia. Sedangkan sosial secara etimologi terdiri dari dua kata yakni, *sosius* berarti teman dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Kemudian secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok manusia lainnya.

Ekonomi secara harfiah dalam penelitian ini dapat diartikan pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok, hingga berujung kepada pengorganisasian, interaksi manusia dan transformasi sosial.⁷ Ihwal ini menjadi sesuatu yang melekat pada arus kehidupan masyarakat secara utuh, pandangan ini juga diperkuat oleh pernyataan Karl Marx bahwasanya sejarah manusia dan arena kehidupan manusia selalu dirangsang oleh kebutuhan untuk hidup (Materialisme Historis).⁸ Secara fungsional ekonomi sosial pada prinsipnya berbicara suatu pandangan pokok tentang klasifikasi serta aktifitas masyarakat berdasarkan kedudukan, kelompok, pengaruh, dan kelas sosial tertentu berdasarkan aktifitas ekonominya.

2. Materialisme Historis.

Pada prinsipnya gerak sejarah selalu dirangsang oleh kebutuhan material manusia yang merupakan dasar buah fikir dari Karl Marx (1818-

⁷ Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), 136.

⁸ Pip Jones, Liza Bradbury and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 46.

1883). Karena dalam arena kehidupan sosial, masyarakat selalu disajikan dengan pertentangan antar golongan yang didorong oleh hasrat berkuasa dan upaya pemenuhan materi sebagai dasar kebutuhan manusia.⁹

Keyakinan yang mengakar dalam teori pertentangan kelas, bahwasanya manusia terikat dengan aktifitas ekonomi. Sejarah yang menyandarkan kepada produksi materi, lantas kegiatan basis yang meluas kepada kehidupan sehari-hari manusia berupa tindakan sosial, politik, agama, dan hal-hal diluar produksi. Fredrick Engels saat kematian Marx lalu berpidato “Manusia pertama kali harus makan, minum, mempunyai tempat tinggal, dan pakaian sebelum berpolitik, ilmu pengetahuan, seni, agama, dan sebagainya.” (17 Maret 1883).¹⁰

Pada dasarnya manusia dalam perkembangannya sendiri merupakan sejarah itu sendiri, artinya manusia adalah sejarah. Bukan sejarah yang membentuk manusia, namun manusianya yang membentuk sejarah dengan segenap upayanya yang dirangsang oleh perubahan model produksi subsistensi.¹¹ Bagi Marx “Manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi mereka tidak membuatnya seperti yang mereka senangi; mereka tidak membuatnya di bawah kondisi-kondisi yang mereka pilih sendiri, tetapi di bawah kondisi-kondisi yang dihadapi secara langsung dari masa

⁹ Irzum Farihah, “Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistemologi *Dialectical and Historical Materialism*),” *Jurnal FIKRAH*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015): 438-439.

¹⁰ Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 45-46.

¹¹ Fuadi, “METODE HISTORIS, Suatu Kajian Filsafat Matrealisme Karl Marx,” *Jurnal Substantia*, Vol. 17, No. 2, (Oktober 2015).

silam. Tradisi dari semua generasi yang telah mati berpengaruh seperti suatu mimpi buruk kepada otak orang yang masih hidup.” (Marx, 1852).¹²

Sehingga pada prinsipnya, Marx menekankan bahwa perubahan ekstrim dalam siklus kehidupan manusia, ketika aktifitas produksi sampai pada tahap kapitalisasi berupa kepemilikan dan berjalannya modal serta produksi. Apabila diturunkan kepada persoalan ekonomi sosial Probolinggo, maka dapat disimpulkan dari sisi diakronis bahwasanya arah gerak kehidupan sosial masyarakat dipicu atau dirangsang oleh aktifitas produksi dan kegiatan monopoli modal.

Sejarah singkat perkembangan manusia, yang terus-terusan mengalami perubahan dalam mode produksinya di setiap lini sejarahnya. Dapat dikatakan perkembangan manusia kemudian mengakar pada dua prinsip model produksi, *pertama* produksi non-kelas yang diasosiasikan kepada produksi komunis primitif dan komunis modern. Kemudian *kedua* adalah produksi berbasis kelas, perkembangan ini diasosiasikan kepada sifat produksi yang memicu timbulnya kelas-kelas. Dua prinsip yang mengakar pada perkembangan produksi ini, menjadi basis-basis yang hidup dalam masyarakat.¹³

Produksi berbasis kelas dalam perkembangan sejarah manusia yang bersifat dialektis, hingga melahirkan beberapa bentuk produksi. *Pertama*

¹² George Ritzer, *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pusaribu, Rh. Widada, and Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 76.

¹³ Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 45-46.

mode produksi kuno, produksi kuno merupakan produksi yang dapat menimbulkan kelas. Karena mode produksi kuno mengandalkan gaya perbudakan untuk mendapatkan surplus pendapatan, sehingga dalam produksi ini terbentuk sebuah kelas antara *si majikan* dan budak. *Kedua* produksi feodal, mode produksi ini berbasis pada kekuasaan dominan. Ketika kekuasaan dominan menang atas dominan lainnya, maka wilayah yang dikuasai menjadi basis kekuasaannya. Pada dasarnya produksi seperti ini berangkat dari kekuatan yang mampu mengambil alih tanah lainnya, hingga membentuk suatu karakter yang disebut dengan tuan tanah. Mode produksi ini kemudian menjadikan penguasa dominan, sebagai kelas yang melakukan eksploitasi terhadap petani, peternak, DLL. *Ketiga* mode produksi kapitalis yang menjadi persoalan kompleks, sebab mode memunculkan karakter kelas baru yakni kelas pekerja (proletariat). Mode produksi kapitalis dalam surplus ekonominya hanya dinikmati oleh kaum pemodal, karena dalam mode produksi ini pemilik alat produksi maupun pemodal menjadi kelas yang melakukan eksploitasi. Dampak dari mode produksi ini adalah menciptakan kelas pekerja yang selalu dieksploitasi tenaganya untuk menghasilkan surplus keuntungan.¹⁴

3. Basis Struktur

Secara konsisten, kebutuhan manusia yang disebut dengan rangsangan untuk terus menerus mendapatkan surplus pendapatan (*basic structure*) merupakan buah intelektual Karl Marx yang memadukan

¹⁴ Jones, Bradbury, and Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, 47-50.

pandangan dialektika Hegel dan arus filsafat materialis Feuerbach. Pada konsep ini, peneliti sedang membicarakan secara sinkronis tahapan tahapan terciptanya sebuah kehidupan sosial pada masyarakat. Pada prinsipnya pandangan ini mengarah kepada *homo economicus* (makhluk ekonomi), artinya segala sub-ordinasi dalam tatanan sosial merupakan jaringan sistem sosial yang diciptakan atau timbul dari kebutuhan ekonomi manusia. Sehingga dalam perkembangannya, umat manusia selalu berada di posisi determinasi ekonomi.¹⁵

Garis sederhana untuk memahami konsep ini, bahwasanya gejala dan gerak sejarah manusia dalam pergeserannya dipicu oleh sistem produksi (basis ekonomi). Lantas dalam perkembangan sejarah manusia, basis ekonomi mengalami perubahan secara terstruktur dalam kehidupan manusia yang disebut dengan dialektika (Pengaruh dari corak berfikir Hegelian).¹⁶ Lantas fenomena produksi yang bersifat eksploitatif menimbulkan pola interaksi berdasarkan kelompok tertentu, berdasarkan kemampuan dalam kepemilikan modal dan produksi.

Selain pendekatan semacam itu, lebih kongkritnya bahwasanya masyarakat era kapital dalam wilayah kontradiksi-kontradiksi masyarakat (dealektika). Marx tidak memisahkan antara nilai dan fakta sosiologis, baginya dalam situasi masyarakat semacam ini tidak pantas untuk tidak

¹⁵ I Wayan Kariarta, "Paradigma Materialisme Dialektis di Era Milenial," *Jurnal SANJAWANI*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2020): 74-77

¹⁶ Fuadi, "METODE HISTORIS, Suatu Kajian Filsafat Matrealisme Karl Marx," *Jurnal Substantia*, Vol. 17, No. 2, (Oktober 2015): 225

memihak. Sekalipun sangat terlihat tendesius dan terdapat keterlibatan emosional, bukan berarti pandangannya tidak akurat.¹⁷

Wilayah basis ekonomi pada konteks ini mengacu pada aktifitas ekonomi berupa produksi kapitalisme, model produksi yang menciptakan dominasi kelompok minor (Borjuis) terhadap kelompok dominan (Proletar). Borjuis sebagai kelompok superior disebabkan atas kepemilikan modal dan produksi, lalu menjadi sekelompok yang implusif demi keuntungan berlipat-lipat (akumulasi profit). Sedangkan kelompok proletar menjadi inferior karena berposisi sebagai tenaga kerja dengan upah minimum yang ditekan untuk menghasilkan barang dan menjalankan alat produksi serta modal borjuis. Golongan superior menjadi pihak dominan yang memiliki kontrol terhadap modal, sedangkan golongan inferior sebagai pihak yang diperas tenaga dan keterampilannya, bahkan mirisnya menjadi kelompok dominan yang teralienasi.¹⁸

4. Suprastruktur

Suprastruktur adalah lapisan jaringan yang tercipta untuk menyokong kebutuhan produksi, dalam pandangan lainnya proses ini berasal dari pengkristalan dari basis.¹⁹ Pada dasarnya suprastruktur ini kemudian menjadi sebuah jaringan atas yang begitu penting, karena

¹⁷ George Ritzer, *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pusaribu, Rh. Widada, and Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 75.

¹⁸ I Wayan Kariarta, "Paradigma Materialisme Dialektis di Era Milenial," *Jurnal SANJAWANI*, Vol. 11, No. 1 (Maret 2020): 74-77.

¹⁹ Muhammad Kambali, "Pemikiran Karl Marx tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur dan Suprastruktur)," *Jurnal AL-IQTISHOD*, Vol. 8, No.2, (Juli 2020): 145.

keberadaannya sekaligus menjadi penyokong dan yang menstabilkan produksi.

Tatanan ini berada di luar produksi yang memiliki fungsinya sendiri antara lain, *pertama* tatanan institusional. Tatanan ini mengarah kepada lembaga yang mengatur arus kehidupan masyarakat, tentunya ini berada di luar arena produksi. Namun, tatanan ini memiliki peranan penting karena langsung berhubungan dengan kepentingan produksi atau infrastruktur. Salah satu bentuk dari tatanan institusional adalah lembaga pendidikan, pemerintahan, seperangkat hukum, dan pasar.

Kedua kesadaran kolektif, tatanan ini mengara kepada hal-hal yang menjadi pondasi atas faham, keyakinan, norma, nilai, dan lain-lainnya. Soal kesadaran kolektif ini kemudian juga menjadi sebuah kerangka berfikir masyarakat terhadap hal apapun yang berada diluar urusan produksi. Namun titik simpulnya, kesadaran kolektif yang dihasilkan oleh bangunan luar produksi berfungsi sebagai pengalihan atas kesadaran masyarakat terhadap situasi kelas-kelas sosial, ketergantungan terhadap hasil produksi, dan pembenaran ketidak sadaran terhadap kelas-kelas.²⁰

Pandangan peneliti, pembacaan ini merupakan sebuah langkah untuk menguraikan secara eksplisit dari arah kepentingan modal borjuis yang dibentuk oleh kebijakan pemerintahan Kolonial Belanda di Probolinggo berupa pengesahan *Geemente* pada 1918. Bagaimanapun, peneliti akan menggunakan pandangan ini sebagai pisau analisa dalam

²⁰ Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 47-50

penelitian ini. yakni, serangkaian yang mengkolaborasikan aspek sinkronis dan akronis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian sejarah, seyogyanya dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, untuk menghasilkan penelitian yang berdasarkan metode ilmiah. Oleh karena itu terdapat beberapa tahap-tahapan untuk melakukan sebuah penelitian sejarah, agar terhindar dari kerancuan dalam proses penelitian maupun hasilnya. Dalam usaha menulis sejarah yang berbasis riset atau penelitian, terdapat beberapa tahap-tahapan antara lain:

1. Pemilihan Topik

Seperti karya tulis lainnya, dalam penelitian ini dalam tahapan awal untuk melakukan sebuah riset harus melakukan pemilihan topik. Urusan memilih topik, perlu rasanya untuk memenuhi beberapa faktor yakni, kedekatan emosional, intelektual dan rencana penelitian.²¹ Pandangan ini juga mempengaruhi dalam proses penelitian, sebagaimana yang dimaksud oleh Kuntowijoyo.

Cara pandang ilmiah seperti ini yang digunakan oleh penyusun untuk membahas persoalan ekonomi sosial Probolinggo pada kurun waktu 1918-1942. Oleh karena itu, indikator utama dalam judul skripsi ini yang dimulai saat pemilihan topik tidak terlepas dari pendekatan yang dimaksud.

²¹ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 70-73.

a. Kedekatan emosional.

Kedekatan emosional dapat dimaknai sebagai kedekatan secara naluriah terhadap topik atau peristiwa yang berhubungan dengan peneliti, kondisi ini sebagai hubungan alamiah antara subjek peneliti dan objek atau topik penelitian. Jika diandaikan, semisal terjadi sebuah kejadian dilingkungan sekitar yang terlampau lama. Dari segi tersebut, peneliti akan mendapati sebuah dukungan moral dalam proses penelitiannya.²² Pandangan ini, mengantarkan pada peneliti agar mampu terangsang dalam segi emosional yang nantinya berimplikasi pada kemudahan dalam mengenal objek penelitian. Pada sisi lain, kedekatan emosional juga mempermudah dalam proses pengumpulan data.²³

Maka dari itu, hasil dari pemilihan topik penelitian di atas yang dibahas dalam konteks penelitian. Merupakan sebuah garapan ilmiah yang selaras dengan kedekatan emosional peneliti, karena Probolinggo merupakan daerah yang dekat dari peneliti. Sekalipun memiliki administrasi pemerintahan yang berbeda. Namun dalam beberapa aspek, kawasan dengan serangkaian historis yang melekat dengan penyusun. Oleh karena itu, soal ekonomi sosial Probolinggo merupakan topik yang telah ditentukan oleh penyusun, sebab dalam proses-proses selanjutnya penulis mendapatkan kemudahan secara kedaerahan.

²² Kuntowijoyo, Metodologi, 70.

²³ Dahimatul Afida, Diktat Metodologi Penelitian Sejarah, (Jember, Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021): 23

b. Kedekatan intelektual.

Penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah yang harus melewati metodologi secara ketat, selain itu seharusnya terdapat kefasihan dalam menguasai wilayah pembahasan. Maksud dari hal tersebut adalah kedekatan intelektual. Untuk memenuhi kriteria tersebut, penyusun sudah melakukan pembelajaran secara berkala baik secara teoritis maupun praktis tentang ekonomi sosial.²⁴ Kemudian kedekatan intelektual ini juga sebagai penyeimbang kedekatan emosional, untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ilmiah.

Oleh karena itu penelitian dalam konteks ini, penyusun telah melewati pengkajian-pengkajian dalam bentuk artikel, media, kearsipan, hasil studi terdahulu²⁵ dan diskusi secara verbal. Hingga dapat dikatakan memiliki kedekatan Intelektual dengan topik yang dibahas yakni, sosial ekonomi Probolinggo tahun 1918-1942.

c. Rencana penelitian.

Tahap ini berisikan persiapan-persiapan dalam penelitian, untuk mendapatkan penunjang yang baik dalam proses penelitiannya. Perencanaan ini, peneliti harus memenuhi beberapa aspek antara lain: permasalahan, historiografi, sumber sejarah dan garis besar penelitian.²⁶

²⁴ Afida, "Diktat Metodologi," 24.

²⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2018), 71.

²⁶ Dahimatul Afida, "Diktat Metodologi Penelitian Sejarah" (Jember: Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021): 24

2. Heuristik (pengumpulan sumber)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah proses pengumpulan sumber, kegiatan ini dilakukan setelah menentukan topik pembahasan. Sumber sejarah dapat pula dikatakan sebagai data sejarah,²⁷ kemudian dikumpulkan dengan catatan harus selaras dan sesuai dengan topik penelitian.²⁸ Ketika dikontekskan dalam penelitian ini, sumber data yang diambil berupa kearsipan, dokumen dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan ekonomi sosial Probolinggo. Contoh sederhananya, penelitian ini memuat batasan temporal 1918-1942, jadi data yang diperlukan berupa informasi yang berkaitan dengan tahun itu. Apabila spasial, maka muatan dokumen yang berada di kawasan topik pembahasan. Pada intinya, sumber data tersebut harus betul-betul sesuai dengan topik yang dibahas.

Pengumpulan sumber atau data, dapat berupa dokumen tertulis, *Artifact*, sumber lisan dan sumber kualitatif. Tetapi di ranah penelitian ini, sumber-sumber yang dapat digunakan adalah dokumen, *artifact* dan sumber kualitatif lainnya. Sumber lisan tidak akan dipakai, karena tidak memungkinkan peneliti memakai sumber tersebut dengan alasan 1918-1942 sudah terlewat lampau, dan terdapat sumber sejarah lainnya yang masih memungkinkan digunakan sebagai acuan.

Kemudian sumber data pada umumnya dibagi menjadi dua yakni, sumber data yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Secara sederhana,

²⁷ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2018), 73.

²⁸ Dahimatul Afida, "Diktat Metodologi Penelitian Sejarah| (Jember :Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021): 24

informasi pokok dalam penelitian hanya diperoleh melalui sumber data primer, sedangkan sekunder merupakan sumber informasi yang berfungsi sebagai penunjang.

3. Verifikasi

Verifikasi sumber, merupakan tahapan pengujian terhadap sumber data yang sudah dikumpulkan atau diperoleh.²⁹ Analisa terhadap sumber data, merupakan suatu aktifitas pengujian yang perlu dilakukan oleh peneliti. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, pengujian ini bisa dilakukan secara intern (kredibelitas) dan ekstern (otentisitas).³⁰

a. Autentisitas

Sederhananya, autentisitas merupakan langkah untuk menguji dan mengkritisi secara fisik, kemudian disusul dengan pengujian terhadap isi dan substansi dari data tersebut.³¹ Apabila dikontekskan dengan data yang diambil oleh peneliti, semisal foto tentang Industri Gula di Oemboel dari peninggalan pemodal swasta, maka yang akan dicek berupa: Kualitas dari foto tersebut serta mencermati dan membaca situasi yang nampak dalam foto.

b. Kredibelitas

Setelah keautentikan sudah terpenuhi atau data sejarah yang sudah melewati proses autentifikasi di atas, maka langkah selanjutnya adalah menguji data sejarah itu dengan tahapan kredibelisasi. Pada

²⁹ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 77.

³⁰ Dahimatul Afida, Diktat Metodologi Penelitian Sejarah, (Jember: Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021), 25

³¹ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 77.

prinsipnya, tahapan ini berupaya melihat dan mengkritisi melalui faktor lain atau yang berada diluar data tersebut yang memiliki korelasi.³² Misal, terdapat sebuah gambar tentang foto Pabrik Gula Oemboel maka kita harus melihat dan menelusuri daerah tersebut, apakah benar daerah itu memiliki atau terdapat peninggalan berupa bangunan semacam itu. Bukan hanya itu, juga dapat melihat dari sebuah kabar berita, media dan sumber lainnya yang pernah menyinggung Industri tersebut.

4. Interpretasi

Ketika verifikasi sumber sudah terlaksana, maka tahapan ini yang menjadi langkah selanjutnya untuk mencapai hasil objektif dalam sebuah penelitian. Interpretasi, merupakan sebuah tahapan penafsiran terhadap sumber sejarah atau data sejarah. Tahapan ini, merupakan langkah penafsiran dari sisi subjektif peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan teruji secara kritis dalam langkah-langkah penafsirannya³³ untuk mencapai hasil penelitian yang objektif. Secara sederhana, posisi peneliti dituntut untuk menyampaikan fakat konkrit tanpa memiliki kecenderungan apapun. Untuk itu, terdapat dua tahap dalam proses interpretasi antara lain:

a. Analisis

Artinya, fungsi dari analisis adalah untuk menguraikan sumber data yang telah diverifikasi. Data sejarah atau sumber data, pasti memiliki informasi yang akan menjadi penunjang dalam pemaparan

³² Dahimatul Afida, "Diktat Metodologi Penelitian Sejarah," (Jember :Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021), 25.

³³ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 78.

sebuah pesan. Kemudian dari sana akan disebut sebagai fakta, kemudian secara sederhana analisis merupakan sebuah seperangkat kegiatan untuk mengambil sebuah fakta di dalam sumber data tersebut.³⁴

b. Sintesis

Merupakan serangkaian langkah, untuk menyatukan sebuah sumber data kemudian diambil sebuah titik simpul. Dapat diumpamakan dengan sumber data yang berisikan informasi peperangan, penjarahan, mengambil kepemilikan tanah dari tuan tanah, memanfaatkan sumber daya (manusia/alam) untuk kepentingan sepihak dan mengakuisisi kedudukannya di daerah tersebut. Maka hasil sintesis dari data itu, mengarah kepada titik simpul pendefinisian “Penjajahan”.³⁵

Proses interpretasi ini, biasanya akan mengantarkan peneliti pada titik perbedaan sekalipun dari sumber data yang sama.³⁶ Namun, perbedaan tersebut terbilang wajar dan dapat disahkan.

5. Penulisan Sejarah (Historiografi).

Historiografi atau proses penulisan sejarah, harus memperhatikan aspek kronologis. Oleh karena itu dalam proses ini, peneliti harus

³⁴ Dahimatul Afida, “Diktat Metodologi Penelitian Sejarah” (Jember: Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021), 26.

³⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 79.

³⁶ Dahimatul Afida, “Diktat Metodologi Penelitian Sejarah,” (Jember: Universitas KH. Achmad Shiddiq, 2021), 26.

mematuhi rambu-rambu di sektor kronologis seperti; Tahun, tanggal, hari, bahkan jamnya.³⁷ Untuk penyajian, antara lain

- a) Pengantar
- b) Hasil Penelitian
- c) Simpulan

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan meliputi:

1. Konteks Penelitian

Konteks penelitian berisikan persoalan yang melatar belakangi dalam sebuah peristiwa yang akan dibahas, sebagai rangsangan, alasan dan modal peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Sekaligus membangun sebuah argumen-argumen ilmiah dan logis, kenapa objek tersebut perlu untuk dijadikan sebuah bahan untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti memaparkan geliat perubahan zaman Belanda dan kemudian memaparkan tentang latar sejarah yang bakal dibahas, tentang ekonomi sosial di Probolinggo pada 1918-1942.

2. Fokus Penelitian

Sebagai langkah pengklasifikasian sub persoalan yang akan dibahas, sebagai bahan untuk diuraikan oleh peneliti. Dalam rangka ini, peneliti memaparkan tentang geliat perubahan di Hindia Belanda bagian timu jawa yakni; 1) sosial ekonomi di Probolinggo pada zaman kolonial Belanda

³⁷ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2018), 81.

1918-1942, dan 2) sosial ekonomi di wilayah infrastruktur dan suprastruktur di Probolinggo di Probolinggo 1918-1942.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Menciptakan atau menentukan batas-batas dalam penelitian yakni, tempat (spasial) dan waktu (temporal).

4. Tujuan Penelitian

Langkah ini, sebagai sebuah ketentuan dalalam menentukan sebuah arah tujuan dalam penelitian ini. Jika diabstraksikan dalam pertanyaan, apa tujuannya meneliti hal itu? Jadi alasan-alasan yang diutarakan berdasarkan kajian akademis dan konteks dalam permasalahan.

5. Manfaat penelitian.

Hal paling sederhana untuk menguraikan ini berbentuk sebuah pertanyaan, apa kontribusi yang akan dilakukan berdasarkan hasil penelitian tersebut? Namun, jawabannya harus disampaikan secara teoritis.

6. Studi terdahulu

Hal ini berisikan sebuah pengkajian terhadap penelitian yang terdahulu, kemudian dikomperasikan dengan penelitian ini antara kesamaan dan perbedaannya.

7. Kerangka Konseptual

Menjelaskan secara koherensif, konsep yang diusung dengan objek penelitian serta memaparkan keterkaitan dan hubungannya antara konsep dan objek penelitian.

8. Metode penelitian

Menjelaskan langkah-langkah atau memaparkan, metode yang berkaitan dengan sejarah dalam proses pemilihan sampai pada taraf kepenulisannya.

9. Sistematika pembahasan

BAB II (Pembahasan)

Bab ini penulis mulai membahas dan menulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam hal ini penyampaian berupa SEJARAH SOSIAL EKONOMI DI PROBOLINGGO PADA ZAMAN KOLONIAL BELANDA 1918-1942

BAB III (Pembahasan)

Bab ini penulis mulai membahas dan menulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam hal ini penyampaian berupa SOSIAL EKONOMI DI WILAYAH INFRASTRUKTUR DI PROBOLINGGO 1918-1942.

BAB IV (Pembahasan)

Bab ini penulis mulai membahas dan menulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam hal ini penyampaian berupa SOSIAL EKONOMI DI WILAYAH SUPRASTRUKTUR DI PROBOLINGGO

BAB V (Penutup)

1. Kesimpulan

2. Saran

Bagian akhir

1. Daftar pustaka

2. Lampiran-lampiran

3. Pernyataan keaslian tulisan

4. Biodata penulis

BAB II

PEMBAHASAN

SEJARAH SOSIAL EKONOMI DI PROBOLINGGO 1918-1942

A. Sosial Ekonomi Pra-Liberal Abad 19 (1830-1870)

Sejarah eksploitasi di Nusantara merupakan serangkaian peristiwa yang terus bergulir seiring perkembangan model ekonominya, sebelum bahkan awal kedatangan Belanda. Nusantara telah menjadi arena aktifitas ekonomi sosial berbasis feodal. Seiring berjalannya waktu, sebelum sampai pada tahap liberalisasi perekonomian.

VOC merupakan organisasi dan Perusahaan dagang yang memiliki peran aktif dalam memonopoli ekonomi di Nusantara, dengan pendekatan menjadikan pejabat lokal sebagai pioner utama untuk memeras tenaga pekerja.³⁸ Orientasi keuntungan yang dikerjakan mengakibatkan eksploitasi berlebihan pada akhirnya berahir dengan kehancuran VOC sendiri sebab aktor-aktor perusahaan melakukan praktek korupsi secara masif. Sehingga rute aktifitas perekonomian menjadi busuk, karena fenomena semacam ini menjadi penyelewengan secara tersistematis.³⁹

Masuk pada tahun 1830, pemerintahan Belanda di Hindia menerapkan kebijakan tanam paksa. Terdapat beberapa faktor mengapa pemerintahan Belanda memberlakukan kebijakan tersebut, faktor-faktor ini didorong oleh beberapa alasan.

³⁸ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Suarto (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 33.

³⁹ Boediono, *Ekonomi Indonesia: dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: PT. Mizaman Pustaka, 2016), 43-45.

1. Tanggungan hutang pemerintah Belanda, dan dimaksudkan adanya proyek tanam paksa untuk meringankan beban hutang tersebut.⁴⁰
2. Perlawanan-perlawanan seporadis setiap lini kelompok dan feodalisme penduduk lokal, kelompok perlawanan yang begitu masih mampu memporak-porandakan kas koloni Belanda. Lantas peristiwa perlawanan Diponegoro (1825-1830), merupakan bentuk konkrit yang menghabiskan dana perang sebesar 20 juta gulden.⁴¹
3. Biaya perang Belanda saat zaman perang Napoleon dan usaha Belgia menjadi bangsa berdaulat yang diakui kemerdekaannya pada 1839,⁴² peperangan yang terjadi di Eropa sangat menguras kekuatan beserta keuangan negara.⁴³

Aktifitas ekonomi sosial yang terjadi di Hindia Belanda sejak ditetapkan tanam paksa, merupakan mode produksi feodal yang begitu eksploitatif⁴⁴ dengan memanfaatkan kepemimpinan lokal.⁴⁵ Cara-cara yang eksploitasi seperti ini, merupakan mekanisme yang pernah dilakukan oleh VOC.⁴⁶ Mode produksi dan metode pendekatan yang dilakukan pemerintahan

⁴⁰ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Suarto (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 40.

⁴¹ Vira Maulisa Dewi, Wiwin Hartanto, and Rully Putri Nirmala Puji, "Pangeran Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830," *Jurnal SIDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2020): 151.

⁴² M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2016), 183.

⁴³ Alfa Tirza Aprilia, Hendi Irawan, and Yusuf Budi Prasetya Santosa, "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia-Belanda 1830-1870," *Jurnal of Social Sciences & Humanites "Estoria" Universitas Indraprasta PGRI*, Vol. 1, NO. 2 (April 2021): 123.

⁴⁴ Agus Susilo dan Sarkowi, "The Effect Of Cultuurstelsel Politics On Indonesia Community Development," *Jurnal SWADESI*, Vol.1, No. 1 (2020), 19.

⁴⁵ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Suarto (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 41.

⁴⁶ Sutherland, *Terbentuknya*, 41.

kolonial Belanda, memang memberikan surplus pendapatan tinggi dan sebagai hasilnya pemerintah Belanda dapat selamat dari krisis.⁴⁷

Tapi tidak dengan situasi yang didapi oleh golongan penggarap atau kelas yang teralienasi oleh sistem demikian, mereka bekerja sembari mematikan produktifitasnya. Sistem dengan dua kepastian yang sangat bertentangan, halnya pemerintahan Belanda dapat keuntungan tapi tidak dengan penggarap. Satu hal yang pasti, bahwsanya metode produksi feodal, dominasi kekuatan Belanda menggerakkan pemin lokal untuk memobilisasi pekerja produksi berbasis agraris.⁴⁸

Para penggarap digerakkan kesektor agraris dengan komoditas tanaman yang sudah ditentukan, di antaranya adalah gula, nila, teh, tembakau, kayu manis, dan kapas.⁴⁹ Ekonomi semacam ini mendesak para petani atau penggarap dengan memenuhi kebutuhan produksi Belanda, dan pada kenyataanya berujung kepada krisis kemanusiaan di Hindia Belanda. Pemerintahan kala itu memberikan aturan yang tertuang dalam *Staatsblad* tahun 1834, No. 22, berdasarkan ketentuan bahwasanya: a) Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual dipasar Eropa, b) Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa, c) pekerjaan

⁴⁷ Prof. Dr. Boediono, *Ekonomi Indonesia: dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: PT. Mizaman Pustaka, 2016), 50-51

⁴⁸ Hendra Kurniawan, “ Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Petani Jawa 1830-1870, *Jurnal SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11, No 2 (September 2014): 166

⁴⁹ Wulan Sondarika, “Dampak *Culturstelsel* (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari tahun 1830-1870,” *Jurnal Artefak*, Vol. 3, No. 1 (2015): 62

yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi, d) bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah, e) hasil tanaman perdagangan yang disediakan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda: apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat, f) kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk, g) penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya kepada segi teknis dan ketetapan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan.⁵⁰

Garis ekonomi sosial Hindia Belanda dapat digambarkan dengan kemunculan tepi pembatas yang begitu besar, di satu sisi dominasi pemerintahan dapat menikmati jerih payah dari pekerja, dan di sisi lain ada penggarap kian hari keadaannya semakin memburuk. Pada prinsipnya praktek yang dilakukan. posisi petani memang sangat memprihatinkan, bahkan dalam buku Max Havelaar⁵¹ menggambarkan kehidupan kala itu sangat dramatis yang ditulis oleh Multatuli.

⁵⁰ Hendra Kurniawan, “ Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Petani Jawa 1830-1870, *Jurnal SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11, No 2 (September 2014): 167

⁵¹ Boediono, *Ekonomi Indonesia: dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: PT. Mizaman Pustaka, 2016), 51.

B. Sosial Ekonomi Liberal Abad 19 Akhir hingga 20 Awal (1870-1900).

Perkembangan berbau kebaruan dan akibat revolusi Prancis, paham liberal yang muncul berkat peristiwa perpidahan sistem kenegaraan perlahan memasuki setiap lini kehidupan di Eropa. Pandangan dan ideologi tergolong baru yang menjadi faham terkemuka di beberapa elemen aktifitas politik praktis lantas mendorong pada tahap liberalisasi perekonomian.

Era 1870 oleh banyak kalangan Sejarawan babak ini dikenal sebagai babak liberalisasi di Hindia Belanda, perkara ekonomi tidak luput dari perkembangan ide-ide demikian. Untuk pertama kalinya sejarah perekonomian mulai memberikan peluang untuk modal swasta, agar melakukan penetrasian modal di wilayah produksi perekonomian.⁵²

Berangkat dari polemik yang dramatis akhirnya terbangun sebuah sistem ekonomi yang mendominasi kehidupan di Hindia Belanda, memang dalam hal ini tidak dapat ditolak bahwasanya asas liberal menginginkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak dengan fenomena yang sedang terjadi, golongan kapital swasta memiliki sudut pandang bahwasanya Hindia-Belanda kala itu adalah pusat untuk mendapatkan surplus keuntungan.⁵³ Sehingga terbentuk sebuah arena kehidupan yang kaya dengan kesenjangan, kendati bertengger industri modern yang memegang kendali produksi.

Lantaran terdapat gerakan dari modal swasta, kehidupan masyarakat Hindia-Belanda semakin kompleks. Kehadiran sistem perekonomian yang

⁵² Edisi Pemutakhiran, *Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 371.

⁵³ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. Tim Penerbit Serambi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2008), 328.

meletakkan orientasi surplus keuntungan, menghadirkan peta struktur kehidupan masyarakat semakin kompleks. Salah satu akibat dari model penetrasian modal swasta, mendorong penduduk Jawa kepada sistem model produksi kapital dengan diikat oleh sistem upah. Alasan semacam ini, daerah-daerah potensial mulai dikuasai pemilik modal sehingga menghilangkan akses subsisten secara tradisional, lantas menjadikan kebutuhan masyarakat mulai diikat oleh relevansi keuangan.⁵⁴

Salah satu bentuk transformasi menuju kebijakan ekonomi liberal adalah aturan dalam *Agrarische Wet* (undang-undang agraria) 1870 yakni:

1. Tanah milik rakyat tidak dapat diperjual belikan kepada non-pribumi.
2. Di samping itu tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh non pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan.
3. Untuk tanah lebih domain lebih luas ada kesempatan bagi non pribumi memiliki hak guna, ialah:
 - a. Sebagai tanah dan hak membangun
 - b. Tanah sebagai erfpacht (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun⁵⁵

Kemudian terdapat undang-undang tentang pemberdayaan gula (*Suiker Wet*), yakni dengan menghentikan ekspor tanaman tebu dan sekaligus upaya bertahap untuk menghapus model tanam pakasa. Tetapi kebijakan ini

⁵⁴ Edisi Pemutakhiran, Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 372

⁵⁵ Yusuf Perdana, Henry Susanto, and Yustina Sri Ekwandari, "Dinamika Industri Gula Sejak Cultuurstelsel Hingga Krisis Malaise Tahun 1830 – 1929," *Jurnal HISTORIA*, Vol. 7, No. 2 (2019): 236-237

mendorong untuk memproduksi tebu menjadi gula, sehingga dapat diekspor.⁵⁶

Seiringan dengan diundangkan 2 sajian pokok tersebut, maka geliat ekonomi Hindia Belanda mulai diwarnai oleh investasi, pengusaha swasta dan pengadaan mesin modern untuk produksi gula. Sehingga melahirkan mode produksi kapital beserta struktur masyarakatnya, dan fenomena ekonomi sosial yang lebih kompleks mulai terbentuk. Ekonomi liberal pada akhir abad 19 merubah wajah perekonomian dan sosial di Hindia, setidaknya perubahannya dapat dirasakan dalam beberapa waktu kemudian.

C. Sosial Ekonomi di Probolinggo pada Zaman Kolonial Belanda 1918-1942

Hindia-Belanda sejak berahirnya tanam paksa hingga awal abad 20-an dapat dibidang sebagai epos eksploitasi oleh beberapa pihak yang berkepentingan. Dalam beberapa dekade sejak maraknya paham liberal di Eropa dan salah satunya adalah Belanda, lantas menjadi sebab signifikan kepada daerah jajahan seperti Hindia sebagai ladang akumulasi profit bagi para pemodal swasta sejak awal kebijakan ekonomi liberal diberlakukan.⁵⁷ Namun berbeda nasib dengan penduduk lokal yang semakin hari memiliki keterbatasan terhadap pemenuhan dan penunjang hidup lainnya. Sejatinya maraknya perkembangan ekonomi liberal, menjadi sebuah siklus kelas sosial yang begitu terjal antara pemodal swasta dan buruh kerja.

⁵⁶ Lukman Hadi Subroto and Widya Lestari Ningsih, "Suiker Wet, Undang-Undang Gula di Era Hindia Belanda," diakses pada 24 Desember 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/14/110000879/suiker-wet-undang-undang-gula-di-era-hindia-belanda>

⁵⁷ Boediono, *Ekonomi Indonesia: dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: PT. Mizaman Pustaka, 2016), 51

Banyak perubahan secara simultan di beberapa aspek, antaranya adalah perekonomian, kenyataan ini berangkat pada tabiat manusia yang tidak pernah lepas dengan aktifitas ekonomi. Begitu pula dengan Probolinggo yang menjadi wujud daerah kantong ekonomi, tentu saja memiliki sejarah eksploitas berkepanjangan.⁵⁸

Probolinggo beserta lapisan-lapisan kehidupan masyarakat pada awal abad-20 an, merupakan peristiwa yang menjadi babak penting atas faham-faham tertentu yang terus berkembang. Banyak dorongan maupun gerakan, yang menjadi dasar perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi sosial masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwasanya faham liberal yang menjadi pintu atas masuknya kepentingan produksi para pemodal swasta untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Sehubungannya dengan adanya kebijakan Desentralisasi dan perubahan sosial politik, salah satunya peristiwa pada abad 18. Ketika pemerintahan kolonial mulai mencabut aturan yang melarang membawa istri bagi yang ingin menetap di Hindia-Belanda pada ahir abad 18. Semenjak pencabutan aturan ini, orang-orang Eropa mulai berbondong-bondong berdatangan ke Hindia-Belanda. Sebagian besar mereka memilih tinggal di kota-kota besar Jawa dan dari beberapa lagi tinggal di perkotaan luar Jawa, kemudian sedikit

⁵⁸ Ruli Muji Astutik and Septina Alrianingrum, “ *Geemente Probolinggo 1918-1926*”, *Jurnal AVATARA*, Vol. 1, NO. 3, (Oktober 2013), 523.

memilih tinggal di perdesaan.⁵⁹ Setelah pencabutan peraturan ini, kemudian pertumbuhan penduduk Eropa di Hindia Belanda menjadi masif.

Sementara itu terdapat gerakan untuk mengahiri ekonomi yang begitu tersentralisasi, tindakan ini berangkat dari beberapa komunitas Eropa untuk kepentingan pemodal swasta di Hindia Belanda. Gerakan semacam ini bertujuan untuk memiliki kewenangan lebih dalam produksi, alternatif yang digunakan pada saat itu dengan memiliki kewenangan untuk mengatur daerah sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, terdapat kaca mata sederhana untuk melihat suasana sosial Hindia Belanda awal abad 20 dan pada khususnya di Probolinggo. Untuk membuktikan bagaimana cara kerja modal dalam memodifikasi pola administrasi pemerintahan dan struktur masyarakat, hingga menimbulkan lapisan-lapisan tertentu hingga pada titik keterasingan (alienasi) masyarakat lokal.

Perlu ditegaskan bahwasanya sosial ekonomi di Probolinggo di tahun 1918-1942, merupakan babak kapitalisasi borjuasi secara terstruktur. Karena saat itu memiliki lahan yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan produksi kaum borjuis.⁶⁰ Apalagi soal populasi yang menjadi komoditas hidup terbilang besar, memang hal ini merupakan fenomena saat ekonomi liberal dicetuskan di Hindia. Berdasarkan hasil sensus tahun 1920 di Jawa bagian timur, Probolinggo merupakan daerah dengan populasi terbesar di posisi ke-4 setelah Surabaya, Mojokerto dan Malang. Hasil sensus ini

⁵⁹ Purnawan Basunduro, *Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012)*, (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmaterra Publishing, 2012,) 3-4.

⁶⁰ Ruli Muji Astutik and Septina Alrianingrum, “ *Geemete Probolinggo 1918-1926*”, *Jurnal AVATARA*, Vol. 1, NO. 3, (Oktober 2013): 521.

menyebutkan bahwasanya jumlah penduduk Probolinggo yang terdeteksi sekitar 765.546, dan terdiri dari beberapa etnis yakni: Timur Asing 5.962, Lokal 757.555, dan Eropa 2.029.⁶¹

Hubungan-hubungan semacam ini kemudian terus terjadi sampai kemudian Jepang datang sebagai penantang bangsa Barat, hal ini terjadi karena di era peperangan juga bisa berdampak secara simultan terhadap ekonomi sosial yang ada di daerah tertentu dengan motif kuasa serta surplus kapital terhadap kekayaan di tanah terjajah, dan hususnya Kota Probolinggo. Sejatinya peristiwa penting yang terjadi dan segala bentuk perubahan umat manusia, tidak pernah terlepas dari dasar kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan terhadap produksi dan penghidupan individu dan kelompok, sejak zaman primitif sampai pada era liberalisasi perekonomian di Kota Probolinggo.

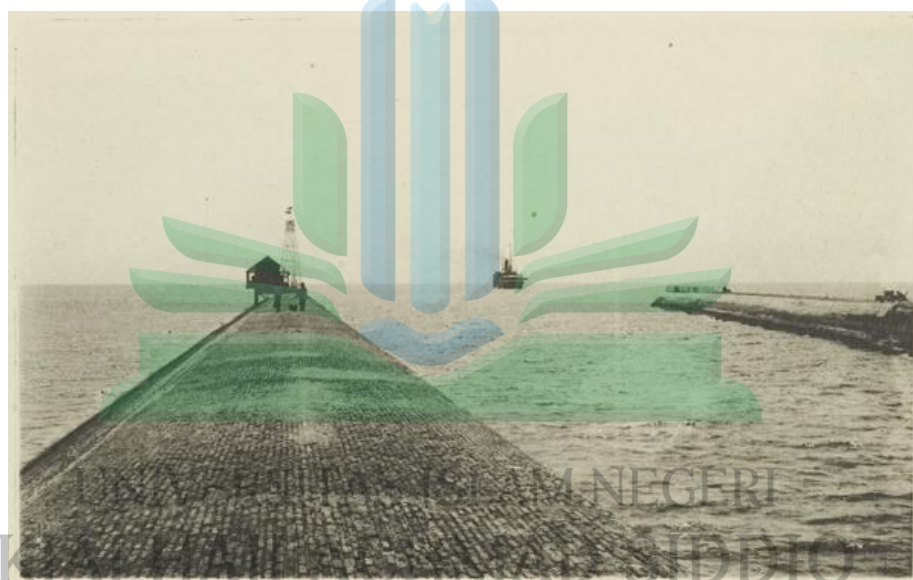
Langkah-langkah setrategis ini begitu masif di Probolinggo, memang pada kenyataannya wilayah kecil ini begitu digemari oleh kaum borjuis. Dapat dilihat dari beberapa data survey, bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih unggul dari beberapa daerah timur Jawa lainnya. Simpulan ini dapat dilihat dari aktifitas ekonomi di Pelabuhan yakni, tentang kegiatan ekspor yang benar-benar giat. Pada tahun 1921 dapat dikatakan sebagai pelabuhan yang agak sibuk, dengan total 39.447 di atas Pasuruan, Panarukan, dan Banyuwangi. Aktifias di kota ini dan daerah lainnya sampai tahun 1927, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table ini.

⁶¹ Astutik and Alrianingrum, "Geemente," 523.

Tabel 1.1 Ekspor Kota Probolinggo dan daerah lainnya.

No	Tahun	Probolinggo	Pasuruan	Panarukan	Banyuwangi
1	1921	39.447	22.597	19.020	7.707
2	1922	28.532	16.900	18.581	5.799
3	1923	43.234	34.295	24.449	6.418
4	1924	46.005	36.193	30.596	5.964
5	1925	36.941	29.918	29.851	9.221
6	1926	31.727	27.656	25.009	8.821
7	1927	32.358	25.242	24.815	4.460
Jumlah		258.244	192.801	172.321	48.390

Sumber: *Statistisch jaaroverzicht van Nederland-Indie (kolonien) jaargang 1926*, hlm. 242 dan *Verslag I van de kleine havens in Nederland Indie over het jaar 1923*, dalam Ruli Muji Astutik dan Septiana Alrianingrum.

**Gambar 1. Gambar Pelabuhan Kota Probolinggo**

Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1930

Berdasarkan tabel di atas, bahwasanya aktifitas ekspor di atas dapat dikatakan Kota Probolinggo menjadi daerah dominan.

Selain dapat dilihat dari aktifitas ekspor di Pelabuhan kota, aktifitas ekonomi yang lumayan masif ini dapat dibaca melalui keberadaan wilayah *hinterland*. Medan yang sangat mumpunin untuk menanam modal di

produksi komoditas beberapa tanaman, karena adanya struktur tanah subur sebab belakangnya bertengger gunung Bromo. Tentunya ini cukup bagus untuk produksi berbasis agraris, seperti beberapa komoditas tanaman yang cukup laku di pasaran Eropa.



Gambar 1.1 Gambar Gunung Bromo

Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1930

Kemudian secara jelas, bahwasanya aktifitas ekspor dan kegiatan produksi lainnya merupakan bagian dari kerja-kerja ekonomi. Kegiatan semacam ini terus kemudian berbiak ke wilayah suprastruktur, hingga dapat membentuk struktur sosial dan politik masyarakat Kota Probolinggo. Namun dari pesatnya aktifitas ini, terdapat pola-pola dominan dari kaum borjuasi.

BAB III

KONDISI SOSIAL EKONOMI DALAM INFRASTRUKTUR DI PROBOLINGGO PADA TAHUN 1918-1942

Basis struktur dalam kajian ini, menjadi satu pembahasan pokok yang menimbulkan jaringan sosial di Probolinggo. Basis struktur atau infrastruktur secara konsepsi adalah siklus ekonomi menjadi dasar utama yang paling bertanggung jawab atas fenomena-fenomena sosial di kota tersebut.⁶² Paling akuratnya untuk melihat wujud konkritnya ialah, aktifitas produksi dan jaringan di dalamnya.

Karena pada dasarnya manusia terus terikat dengan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup, dan hal ini selau menjadi kepentingan utama dalam arus perubahan yang bakal terjadi. Kawasan ini juga tidak terlepas dari masyarakat, dan menjadi keniscayaan pula bahwasanya perilaku masyarakat dalam arena sosial pada mulanya pasti dipatok oleh kebutuhan material. Berbicara kebutuhan material adalah kebutuhan yang mustinya didapati terlebih dahulu, seperti tempat tinggal, makan, minum, pakaian, dan lain-lain.⁶³

Pada tahun 1918-1942 di Probolinggo dalam persoalan ekonomi tidak sesederhana pada zaman primitif, awal abad 20-an ini persoalannya lebih kompleks lagi. Sebab keterbukaan lahan semakin mudah diakses pemodal sekalipun di luar faham serta pandangan ekonomi yang sudah berubah, dan hal ini

⁶² Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 46.

⁶³ Jones, Bradbury, and Boutillier, *Pengantar Teori-Teori*, 45.

adalah dampak pergolakan ekonomi yang berkepanjangan sejak Hindia Belanda mengaplikasikan ekonomi liberal (1870-1900).

Sehubungan dengan hal tersebut, kemudian Hindia menjadi ladang kapitalisasi secara besar-besaran. Berbeda jauh ketika manusia di awal kemunculannya, sarana subsistensinya tidak ada surplus produksi, artinya sesuatu yang dihasilkan olehnya memang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Tentu saja berbeda dengan watak kapitalis era kolonial di Kota Probolinggo, sebab golongan berjuis berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan memperbesar skala produksi.

Representasi kapitalisasi borjuasi di Probolinggo dapat ditunjukkan dengan adanya lahan produksi, seperti pabrik-pabrik gula dan perkebunan. Kegiatan semacam ini nantinya menjadi alasan utama atas terjadinya setiap bentuk-bentuk perubahan yang ada, khususnya menyangkut suprastruktur. Untuk itu, pembahasan kali ini lebih jauh membicarakan basis ekonomi/infrastruktur yang ada di Kota Probolinggo.

A. Basis Struktur Berupa Industri

Basis ekonomi adalah sarana yang menciptakan hubungan-hubungan dalam produksi, hubungan ini begitu bias di wilayah Probolinggo. Oleh karena itu, produksi-produksi yang menciptakan suatu siklus kehidupan antara buruh dan pemodal dapat dilihat dengan keberadaan industri.

1. Pabrik Gula

Era ekonomi liberal tentunya membuka tabir untuk kapitalisasi di Probolinggo, dan kemudia lahir sebuah masyarakat baru yang bertengger

di daerah tersebut. Perubahan-perubahan semacam ini bukan berarti terjadi begitu saja, karena laju ekonomi di Hindia-Belanda sering kali mengalami transisi. Demikian pula di Probolinggo, salah manifestasi dari suasana ekonomi semacam ini adalah Pabrik Gula.

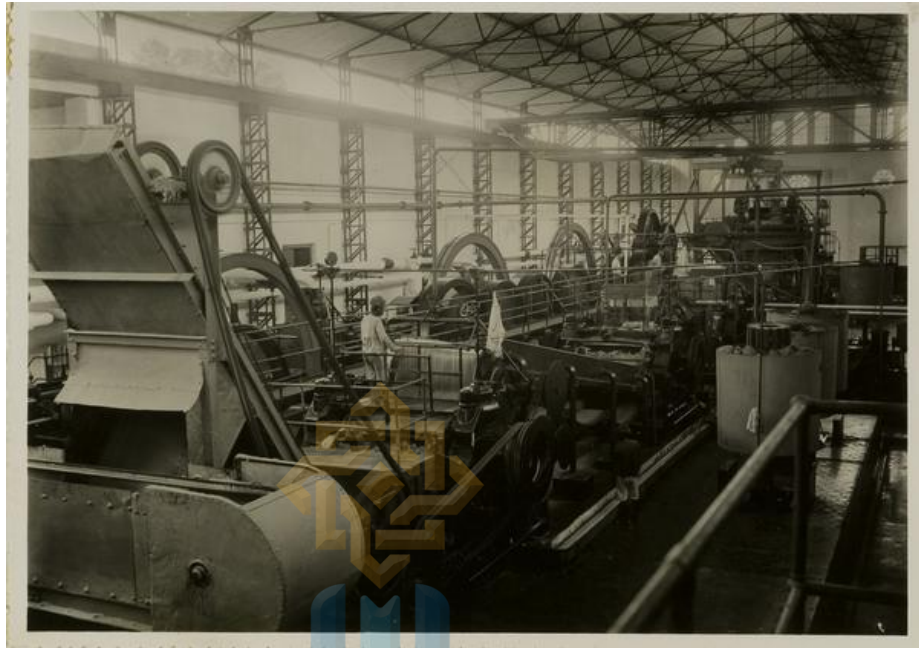
Pabrik Gula sudah menjadi arena penetrasi modal yang banyak tersebar di Hindia-Belanda, sebab produksi ini banyak diminati di pasar-pasar Eropa. Begitu pula di Probolinggo, Pabrik Gula menjadi primadona untuk kalangan pemodal swasta yang ingin mendapatkan keuntungan melimpah di sektor produksi gula. Lingkup ini juga menjadi basis ekonomi yang tersebar di beberapa penjuru, aktifitas eksploitasi oleh kapital di kawasan ini terbilang cukup masif hingga mencapai 12 industri.

Masifnya industri ini tidak terlepas dari perilaku konsumtif di beberapa wilayah dan tidak kalah ketinggalan ialah wilayah Eropa, tentu saja perilaku konsumtif ini menjadikan gula sebagai komoditas produksi yang mewarnai pasar-pasar Eropa. Sehubungan meledaknya perilaku konsumtif ini, Hindia Belanda menerima imbasnya dengan pengadaan mesin-mesin produksi gula berskala besar. Daerah-daerah yang menjadi pendongkrak produksi gula banyak dijumpai di pulau Jawa, dan mayoritas mesin-mesin produksi terletak di bagian timur Jawa. Sebab itu Probolinggo yang sejak awal menjadi wilayah potensial terhadap produksi tersebut, menjadikannya sebagai daerah industrial yang lumayan pesat.

Pabrik Gula di Probolinggo tersebar di beberapa titik di antaranya, Sumber Kareng, Umbul, Wonolangan. Wonoaseh, Sukodono, Jatiroto,

Gending, Maron, Pajarakan, Bagu, Kandang Jati, dan Paiton. Daerah-daerah ini menjadi ladang produksi gula yang tak henti-hentinya memasok tanaman tebu di daerah lainnya.

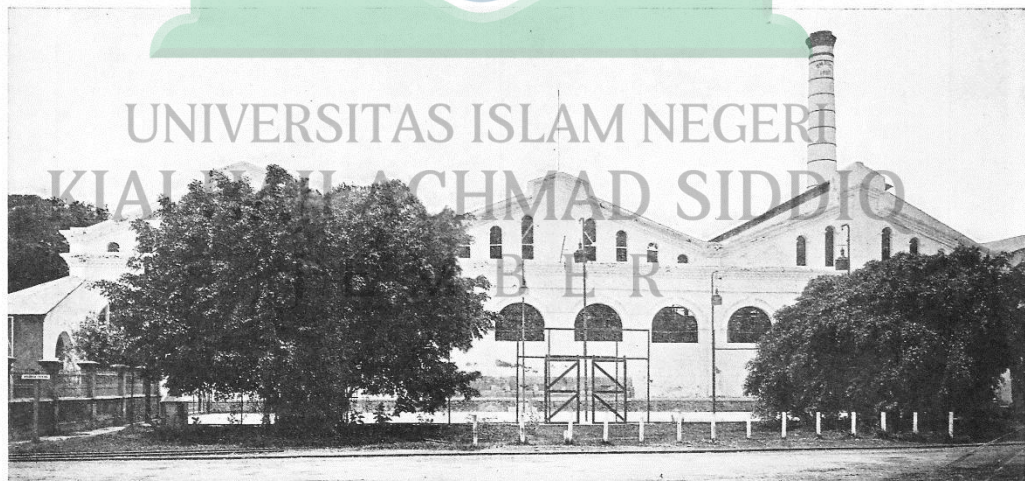
Bangunan basis ini tentu saja memberikan dampak signifikan dalam kehidupan di Probolinggo, karena pada dasarnya basis ekonomi tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya mekanisme yang ada di luar jaringan. Hingga pada awal Abad 20-an ini, mendorong pertumbuhan penduduk secara signifikan, baik dari luar Jawa maupun dari penduduk non-Nusantara. Pada tahapan ini, adanya mesin-mesin produksi, dalam segi pengadaan dan berjalannya. Tidak luput dari peranan para pemodal swasta atau pemodal yang berangkat dari pemerintahan, jika dilihat pada asal-muasalnya. Karena daerah ini dahulunya memang banyak tersebar komoditas tanaman tebu, sehingga ada beberapa kalangan penduduk yang memiliki produksi rumahan, dengan memanfaatkan hewan ternak untuk menggiling.



Gambar 2.1 Gambar Pabrik Gula Sumber Kareng

Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1925.

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/805089?solr_nav%5Bid%5D=93013c83b7adb9c06f75&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=19



Gambar 2.2 Pabrik Gula Oemboel Kepunyaan Swasta 1910.

Sumber: G. Roger Knight 1890-1930,

<https://journals.openedition.org/archipel/docannexe/image/1709/img-4.jpg>

Kapitalisasi yang berada di Probolinggo tidak henti-hentinya memberikan dampak yang cukup bias antar kelas, hal ini dipicu oleh kondisi Hindia merupakan daerah jajahan Kerajaan Belanda dan pemilik modal atau produksi memiliki mekanisme yang begitu terlihat dalam meraup keuntungan. Lain cerita ketika membicarakan satu kondisi antara kelas borjuasi dan buruh pabrik, tentu saja kesenjangan menjadi sebuah keniscayaan.

Salah satunya adalah pemilik modal yang berhasil mengakuisisi pabrik Oemboel dan dijawab dengan menguatnya komoditas gula di pasar Eropa, menjadikan dimensi kelas semakin memburuk. Sepanjang proses kapitalisasi di Probolinggo membangun sebuah hubungan dalam produksi ini kian jauh, antara pemodal dan para buruh pabrik.

2. Produksi Agraris (Perkebunan)

Sejak mula otoritas Belanda menjadikan Hindia Belanda, sebagai kantong ekonomi yang bertitik tumpu kepada komoditas tanaman. Bahkan komoditas tanaman yang sejak mulanya ada di tanah Nusantara kemudian menjadi ada, karena dibawa langsung dari luar.

Probolinggo termasuk daerah penting yang menyediakan ladang produksi agraris, karena dikenal sebagai kawasan *hinterland*, Alhasil daerah dengan kualitas tanah memadai, pada akhirnya memikat para investor dan modal swasta. Perkebunan pada mulanya sudah ada sejak ekonomi liberal diberlakukan, hingga keadaan tanah-tanah pasca ekonomi liberal sudah sibuk menanam beberapa komoditas tanaman.

Komoditas tanaman yang massif di Probolinggo hingga tahun 1918-1924 adalah tebu, kopi, dan komoditas lainnya. Lantas kemudian terdapat ide ekonomi yang berkaitan dengan sistem produksi pada abad 19, sistem produksi yang dimaksud adalah produksi gula manual menjadi produksi berbasis mesin modern. Fenomena demikian kemudian menjadi titik balik bagi produksi agraris yang menanam komoditas tebu, karena masifnya permintaan tinggi dari industri gula berbasis tebu.



Gambar 2.3 Perkebunan Tebu Miliki Perusahaan Gula

Sumber: *Leiden University Libraries Digital Collections*, 1926.

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/726646?solr_nav%5Bid%5D=9deb1e009e8579e79f1d&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=4

3. Transportasi

Berjalannya dan pesatnya produksi maka secara tidak langsung muncul kebutuhan mendesak untuk mengangkut komoditas tertentu, disamping itu secara bersamaan segala lini kehidupan juga membutuhkan mobilitas yang efisien. Mekanisme yang menjadi penunjang komersialisasi terhadap transportasi, kebutuhan mendesak terus digaungkan oleh pengusaha-pengusaha swasta maupun dari pemerintahan Belanda. Probolinggo sekaligus menjadi daerah yang semestinya memiliki transportasi modern untuk menunjang segala aspek kebutuhan baik produksi dan non-produksi.

Adanya kebutuhan untuk mendapatkan mobilitas yang efisien, menjadi suatu objek nyata dalam proses penanaman modal borjuis. Mekanisme ini tidak lepas dari perhelatan tatanan ekonomi sosial di Hindia-Belanda, lantas Probolinggo sebagai ladang produksi menjadikannya daerah yang membutuhkan transportasi modern. Terdapat beberapa transportasi modern yang menjadi bahan pembahasan kali ini yakni, term, kereta api, dan jasa angkutan berupa mobil.

a. Transportasi mobil Ali Karman (1933)

Ali Karman merupakan salah satu borjuis lokal yang berhasil melakukan penetrasian terhadap produk jasa, melakukan debut di bidang transportasi pada tahun 1933.⁶⁴ Pada mula-mulanya modal swasta ini, hanya mempunyai mobil bekas, setelah berhasil

⁶⁴ Afif Maulana, Sri Ana Handayani, and IG Krisnadi, "History Of Gemeente Probolinggo 1918-1942", *Jurnal HISTORICA*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2013): 220.

mengembangkan basis ekonomi yang dipenetrasikan pada sebuah bengkel motornya.⁶⁵ Struktur yang menjelaskan bagaimana basis ekonomi itu dapat berkembang, pada mula-mulanya dengan suatu pengadaan produksi basis dan diimbangkan oleh kebutuhan dasar dari non-produksi.

Perkembangan basis ekonomi kemudian mengakar pada kehidupan masyarakat setempat, sehingga pada tahun 1936⁶⁶ surplus ekonominya dimanifestasikan dalam bentuk bis kecil yang dibeli. Stabilitas surplus ekonomi yang dimiliki oleh Ali Karman ini, lebih spesifiknya menjadi pembahasan di bab selanjutnya. Karena bangunan yang menunjang aktifitas modal salah satunya adalah pasar, dan secara husus bakal dibahas di bab selanjutnya.

b. Kereta api dan Tarm

Dua jenis transportasi yang begitu diminati oleh beberapa banyak kalangan, sehingga kebutuhan masal seiring berjalannya waktu semakin melonjak. Perkara yang menjadi fondasi untuk perkembangan modal swasta, dalam melakukan penetrasian modal di bidang transportasi. Beberapa dekade terakhir, produksi di Hindia Belanda mengalami surplus yang sangat besar antara abad 19-20. Sehingga keperluan untuk mengangkut beberapa komoditas menjadi sangat mendesak orang borjuis, sehingga mendorong pemerintah Belanda

⁶⁵ Iqbal Hastri Firmandani and Agus Trilaksana, "Perkembangan Transportasi Darat (BUS) di Probolinggo Tahun 1933-1956, *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 3, (2021): 5.

⁶⁶ Firmandani and Trilaksana, "Perkembangan," 8.

untuk membangun jalur kereta api.⁶⁷ Terlepas dari sejarah transportasi, Probolinggo juga menjadi daerah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan berkat pemberian konsesi pemerintahan Belanda kepada modal swasta. Selain kereta api, terdapat jenis trem yang menjadi suatu jenis transportasi yang dibutuhkan oleh beberapa kalangan di daerah Kota Probolinggo.⁶⁸

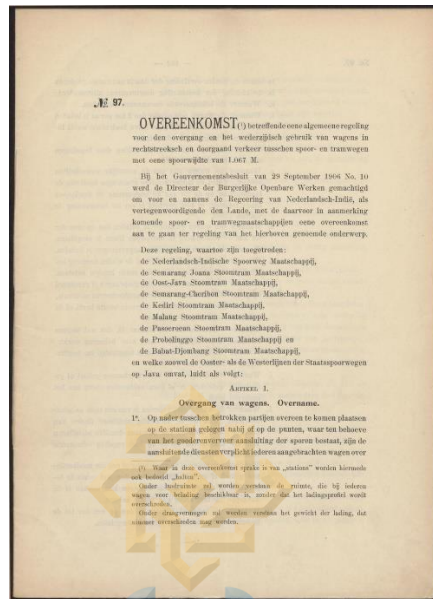
Jenis transportasi yang mewarnai sibuknya lalu-lalang masyarakat Probolinggo, ternyata dimiliki oleh perusahaan yang melakoni kerja sama dengan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Lalu pemerintah memberikan wewenang berupa konsesi terhadap Perusahaan swasta dan milik usaha pemerintah sendiri. Lantas Perusahaan swasta yang mendapatkan konsesi di Probolinggo ialah *Probolinggo Stoomtram Maatschappij (PbSM)*.⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Purnawan Basundoro, Pengantar Kajian Sejarah Ekonomi Perkotaan Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2023), 80-81.

⁶⁸ Iqbal Hastri Firmandani and Agus trilaksana, "Perkembangan Transportasi Darat (BUS) di Probolinggo Tahun 1933-1956," *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 3 (2021), 7.

⁶⁹ Purnawan Basundoro, Pengantar Kajian Sejarah Ekonomi Perkotaan Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2023), 82-83.



Gambar 2.4 Perjanjian antara Pemerintahan Kolonial Belanda dengan beberapa Perusahaan Swasta.

Sumber: Delpher 1901-1921,

<https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB31:027442000:00003&query=+Tram+Stoomtram+Maatschappij+te+Probolinggo&page=1&coll=boeken&rowid=1>

1) Tram

Trem merupakan transportasi publik yang berkembang di kota modern Eropa, sehingga laju perkembangan teknologi ini kemudian terbawa ke negeri jajahan mereka. Belanda kemudian sebagai negeri yang memiliki daerah jajahan, membawa perkembangan industri transportasi ke Hindia-Belanda. Karena pada beberapa disiplin aktifitas modal swasta yang memiliki surplus produksi, juga menjadi suatu alasan mengapa transportasi ini sangat dibutuhkan. Alasan lainnya, daerah-daerah tertentu di Hindia ingin berupaya menjadikan kota modern seperti yang tersebar di Eropa.

Laju basis ekonomi di Probolinggo juga dimanifestasikan dalam bentuk transportasi, fenomena nyata yang menjadi struktur kompleks, untuk menggambarkan tentang interaksi modal yang dikuasai oleh kalangan borjuis. Mekanisme yang pada dasarnya dapat diuraikan di bab selanjutnya, sebab pada dasarnya laju basis ekonomi juga didorong oleh kebutuhan pasar.

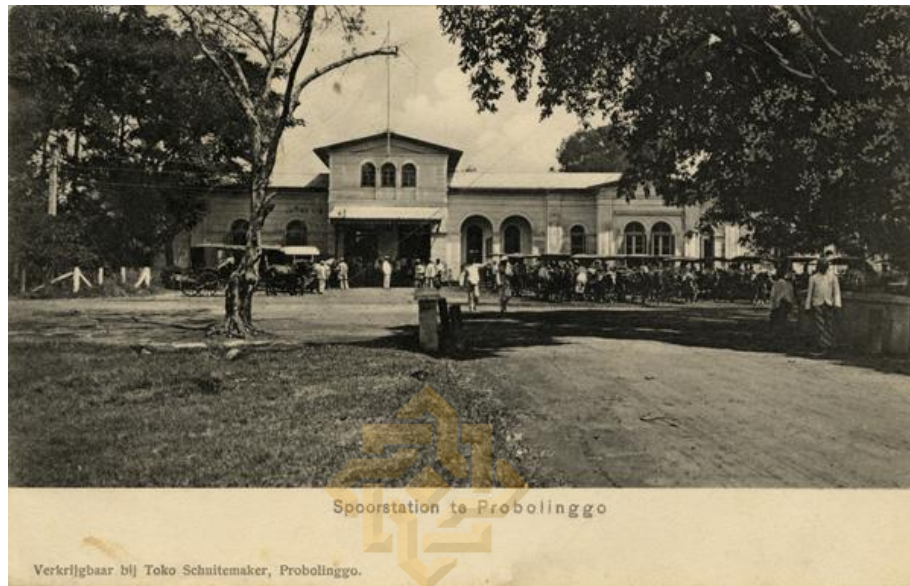
2) Kereta Api

Kereta api merupakan sarana transportasi yang dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat, sebagai ladang perluasan aktifitas ekonomi Probolinggo. Kereta api yang berada di Probolinggo berasal dari Perusahaan *Stoomtram Maatschappij* (PbSM), yang mendapatkan konsesi dari pemerintahan kolonial. Untuk membangun jalur rel kereta api di beberapa wilayah probolinggo Probolinggo, lintasan yang dimiliki oleh Perusahaan sawasta berkat konsesi dari pemerintah yakni, Probolinggo, Kraksaan, dan Paiton.⁷⁰ untuk lebih jelasnya diuraikan di tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1

Perusahaan <i>Stoomtram Maatschappij</i> (PbSM)	Daerah		
	Probolinggo	Kraksaan	Paiton

⁷⁰ Basundoro, Pengantar, 83.



Gambar2.5 Stasiun kereta api milik *Stoomtram Maatschappij* (PbSM), di Probolinggo.

Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1910, https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/856357?solr_nav%5Bid%5D=1727b2e9a89cb80d0f6a&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=9

B. Kelas Sosial dalam Produksi di Probolinggo

Wilayah produksi terdapat hubungan pasti yang mencangkup hubungan sosial antar kelompok tertentu, mekanisme ini beralan sebab adanya sistem buruh dan majikan di era liberal. Terdapat fungsi dalam bangunan produksi yang tak bisa di elakkan, antara lainnya pemilik produksi menjadi majikan atas pekerja upahan (buruh). Lantas fenomena ini mendorong pada prilaku sosial yang bersifat dominasi kelas superior (Pemodal/pemilik alat produksi) kepada kelas inferior (buruh), sistem ini kemudian melahirkan monopoli keuntungan yang sangat bersenjang.

Proses monopoli perekonomian ini kemudian menjadi bahan dasar atas kemampuan-kemampuan atas segala lini kehidupan, kemampuan yang

dimaksud adalah kemampun belanja, dan menikmati hasil surplus keuntungannya. Kualitas semacam ini hanya dapat didapatkan oleh kaum minor yakni borjuis, sedangkan kamu buruh hanya tersendat pada pemunhan hidup hari-perhari dan terkadang tidak bisa. Lantas kekuatan inilah yang menjadi bahan utama untuk menjawab situasi dan kondisi buruh, sebagai kelas mayor namun paling dirugikan sebab kehilangan produktifitasnya sebagai manusia.⁷¹

Secara sederhana justifikasi kelas sosial yang terindikasi secara jelas adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, pemenuhan dalam aspek kebutuhan primer dan tersier.⁷² Identifikasi sederhana untuk melihat kesenjangan antara borjuis dan proletar, secara sederhana sub-bahasan kali ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Borjuis Probolinggo

Probolinggo dengan banyaknya produksi berbasis kapital, banyak melahirkan kelas-kelas sosial di arena produksinya. Untuk melihat fenomena ini, dapat dilihat dari aspek kepemilikan dan instrumen penunjang lainnya, salah satunya daya belanjanya, yang dimanifestasikan kepada gaya hidup. Buruh Probolinggo sebagai komunitas mayor, sedangkan kaum borjuis merupakan kaum minor yang menguasai segala aspek perekonomian. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan pendapatan,

⁷¹ George Ritzer, *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pusaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 76.

⁷² Ardiva Zakia, Asri Ayu Adisti, and Aulia Asmarani, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelas Sosial: Gaya Hidup, Daya Beli dan Tingkat Konsumsi", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 5, (Mei 2022): 455.

kaum borjuis mendapatkan surplus pendapatan berkat produksi barang, sedangkan buruh hanya mendapatkan upah minimum dari gaji yang diberikan majikan.

Dapat diketahui bersama seperti sejarah seorang majikan memiliki Pabrik Gula Oemboel, seorang sepasang kekasih yang berhasil mengakuisisi pabrik gula dengan modalnya. Tahun 1890 Alexander MacNeill berhasil mengakuisisi Pabrik Gula Oemboel⁷³, lantas secara bertahap mulai mendatangkan mesin-mesin modern dari Eropa untuk proses produksi gula.



Gambar 2.6 Sepasang Borjuis Johanna Bezoet de Bie dan Alexander MacNeill, Pemodal di Oemboel.

Sumber: G. Roger Knight 1890-1930,

<https://journals.openedition.org/archipel/1709#tocto1n1>

⁷³ Ronihalim, “Alexander MacNeill: Kisah "Crazy Rich" Pemilik Pabrik Gula Oemboel di Probolinggo”, diakses pada 23 November 2024, <https://probolinggo.inews.id/read/437207/alexander-macneill-kisah-crazy-rich-pemilik-pabrik-gula-oemboel-di-probolinggo>

Sepasang kekasih dapat dikatakan sebagai borjuis kapital, penyematan istilah yang berdasarkan atas kepemilikan modal dan alat produksinya. Sedangkan sepasang kekasih lantas mendapatkan surplus keuntungan, dengan memperkerjakan banyak buruh yang tersebar di Probolinggo. Indikator utamanya untuk melihat kelas sosial yang mereka duduki dengan menekan bukti daya belanja dan kemampuan mereka dalam memonopoli keuntungan.



Gambar 3. Nyonya besar atau istri dari pemilik alat produksi di oemboe.

Sumber: Sumber: G. Roger Knight 1890-1930,

<https://journals.openedition.org/archipel/1709#tocto1n1>

2. Proletar (Buruh) Probolinggo.

Proletar secara harfiah yakni individu yang tidak memiliki alat produksi, karena tidak dapat memiliki lantas menjalankan alat

produksimilik borjuis.⁷⁴ Probolinggo dengan banyaknya mesin-mesin produksi untuk menghasil produk bersekala besar, akibatnya memanfaatkan tenaga dari para pekerja. Tetapi adanya perilaku kapital, menyebabkan para pekerja mendapatkan hasil minimum dan selebihnya yang berkali-kali lipat dimiliki oleh pemodal.

Probolinggo banyak tersebar mesin-mesin produksi yang dimiliki oleh orang borjuis, dengan pesatnya produksi tentunya tidak lepas dari jerih payah buruh pabrik. Namun penghasilan dari buruh pabrik Probolinggo terbilang relative rendah sekalipun menjadi terbesar setelah, Surabaya, Malang dan Kediri. Penghasilan buruh dibedakan sesuai jenis gender, pada rasio rata-rata antara tahun 1923-1926, laki-leki mendapatkan 44,25 sen sedangkan Perempuan 40,25 sen.⁷⁵

Memang gaji atau upah buruh dapat dibilang sangat rendah, bahkan terdapat pejuang kemerdekaan Indonesia sempat memiliki rasa prihatin dalam melihat kondisi buruh pada awal abad 20-an. Karena buruh waktu itu hanya dibayar 0,4 gulden perhari, pendapatan ini masih terbilang jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup⁷⁶ apalagi memiliki kemampuan belanja seperti kaum borjuis.

⁷⁴ Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme, Trj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 51-52.

⁷⁵Ruli Muji Astutik and Septina Alrianingrum, “ *Geemente* Probolinggo 1918-1926”, dalam *Jurnal AVATARA*, Vol. 1, NO. 3, (Oktober 2013): 529

⁷⁶ Tim Redaksi, “Nusantara Penghasil Buruh Murah Sejak Zaman Belanda”, diakses pada 23 November 2024, <https://voi.id/memori/92014/nusantara-penghasil-buruh-murah-sejak-zaman-belanda>

C. Pasar (Komuditas Konsumen)

Pasar merupakan segmen penting dalam bangunan ekonomi sosial era liberal, sebab surplus ekonomi kapital tidak lepas dari komuditas yang berada di arena pasar. Pasar dalam kategori non-produksi dapat menjadi bahan penting, atas laju dan perkembangan produksi. Sebab jaringan ini yang menyajikan permintaan kepada produsen, alhasil nilai suatu produk akan masuk kepada relasi sosial.⁷⁷ Probolinggo sebagai ladang produksi barang maupun jasa, karena pesatnya permintaan salah satunya buktinya di tabel 2.1 bab 2.

Struktur masyarakat yang didominasi oleh ekonomi kapital, sistem ini kemudian menggiring suatu kelompok sosial yang berada di wilayah relasi sosial absolut sebagai komuditas pasar.⁷⁸ Dasar sederhana untuk menguraikan lebih lanjut, bahwasanya adanya barang dan jasa merupakan sebuah fenomena pasti akibat adanya kebutuhan.⁷⁹ Dalam kesempatan ini, ada dua lini yang menjadi pokok pembahasan dalam sub ini, yakni pasar dalam produksi gula, Perkebunan tebu, dan transportasi.

⁷⁷ George Ritzer, *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pusaribu, Rh. Widada, and Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 97.

⁷⁸ Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 46.

⁷⁹ George Ritzer, *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pusaribu, Rh. Widada, and Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 96.

1. Pabrik Gula

Terdapat 12 Pabrik Gula tersebar di Probolinggo, tetapi hanya ada beberapa yang dapat digunakan sebagai contoh untuk membicarakan pasar dalam ekonomi sosial kapital. Mekanisme pasar produksi gula tidak lepas dari perilaku relasi sosial atas daya beli masyarakat yang tersebar di beberapa daerah, sehingga mendorong produksi basis ekonomi untuk terus memproduksi produk yang diinginkan.

Gula merupakan salah satu komoditas yang diminati oleh banyak kalangan, sehingga jumlah produksi serta keuntungan secara bersamaan naik secara signifikan. Tak hayal apabila aktifitas ekspor Hindia Belanda, gula sebagai komoditas unggulan dan pertama. 1874-1914 jumlah ekspor komoditas gula mengalami fluktuasi yang berkembang, namun perubahan drastis pada 1929-1932/34 dan dapat dikatakan sebagai resesi ekonomi akibat eropa dilanda peperangan.⁸⁰

2. Perkebunan

Perkebunan merupakan produksi agraris yang menjawab kebutuhan-kebutuhan tertentu, tetapi untuk hal ini kerja mekanisme pasar dapat bisa diuraikan secara singkat. Karena produksi agraris yang menjadi bahan pokok pembahasan adalah komoditas tebu, yang banyak digandrungi komoditas besar. Salah satunya adalah Perkebunan tebu yang dimiliki oleh persuhan Gula Oemboel, untuk menjalankan kebutuhan produksi gula maka bahan utamanya adalah tebu. Sistem ini mendorong

⁸⁰ Boediono, *Ekonomi Indonesia: dalam Lintas Sejarah*, (Bandung: PT. Mizaman Pustaka, 2016), 58-64.

aktifitas produksi berbasis agraris dengan tebunya, setabilitas dan kekekalan produksinya terus terjaga sebab adanya komoditas pasar yang membutuhkan.

3. Transportasi

Transportasi yang dimaksud adalah kendaraan darat yang beroperasi di Probolinggo, namun disini hanya ada beberapa jenis transportasi menjadi bahan pembahasan. Mekanisme pasar yang ada pada tahap ini, ketika perusahaan-perusahaan mulai membutuhkan angkutan massal salah satunya pabrik Gula, sehingga penyediaan jasa transportasi milik *Stoomtram Maatschappij* (PbSM) membangun lintasan kereta apinya dapat dijangkau oleh Pabrik Oemboel.

Selain perusahaan swasta, basis struktur yang bergerak dibidang penyediaan layanan jasa transportasi adalah milik Ali Karman. Mekanisme basis ekonomi yang berkembang dari waktu-waktu, karena ada kebutuhan yang perlu dijawab dari masyarakat Probolinggo. Lantas komoditas pasa secara absolut tercipta, fenomena ini dapat dilihat ketika orang-orang Eropa memakai layanan ini. Lantas di sisi lain penduduk lokal juga memakai layanan jasa transportasi juga, untuk menunjang kegiatan atau aktifitas ekonominya.⁸¹

⁸¹ Iqbal Hastri Firmandani and Agus trilaksana, "Perkembangan Transportasi Darat (BUS) di Probolinggo Tahun 1933-1956, Jurnal AVATARA, Vol. 11, No. 3, (2021): 9.

BAB IV

KONDISI SOSIAL EKONOMI DALAM SUPRASTRUKTUR DI PROBOLINGGO PADA TAHUN 1918-1942

Dalam posisi ini, masyarakat Probolinggo banyak mengalami anomali perubahan sosial pada sektor-sektor penting. Karena kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembangunan, pengembangan, dan tenaga kerja untuk menjalankan produksi yang dimiliki pemodal. Tentu saja, bukan hanya tenaga pekerja saja yang harus terpenuhi. Terdapat beberapa hal yang kemudian terbentuk maupun berkembang dalam proses pembangunan dan pengembangan, dalam konteks ini dapat dibidang sebagai dampak dari transformasi modal produksi yang menyebabkan perubahan pada kehidupan sosial.

Produksi adalah manifestasi basis ekonomi atau infrastruktur merupakan satu prinsip baku dalam pembahasan ini, yakni jaringan yang memberikan dampak perubahan dalam masyarakat. Dominasi ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk jaringan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Probolinggo, dalam hal ini dapat disebut jaringan suprastruktur. Karena memang pada dasarnya jaringan suprastruktur adalah jaringan atas, hal ini keterlibatannya sebagai arena yang menjaga stabilitas modal dan produksi.⁸²

Suprastruktur sendiri ada dua macam dan telah disebutkan di bab 1 sebelumnya, kemudian dalam pembahasa ini lebih mengarah kepada bangunan instutisional yang dimanifestasikan dalam bentuk lembaga-lemba sosial. Baik

⁸² Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 52.

dalam bentuk lembaga pemerintahan dan seperangkat aktifitas politiknya, pendidikan, hingga lembaga-lembaga yang lainnya.

Sederhananya, basis ekonomi juga membutuhkan stimulus untuk menunjang aktifitas produksi.⁸³ Maka menjadi hal wajar apabila segala gerak kehidupan sosial di Probolinggo mengarah kepada upaya menjaga kesetabilan laju produksi, sekurang-kurangnya menjadi salah satu komoditas penting untuk menunjang pasar.

Struktur non-produksi dapat dikatakan sebagai jaringan suprastruktural, tatanan ini lah yang bakal menciptakan suatu bagan kehidupan sosial masyarakat. kendati demikian, jaringan yang hidup dalam masyarakat ini juga sangat dibutuhkan oleh aktifitas basis ekonomi. Dalam struktur ekonomi sosial hal ini dapat disimpulkan sebagai jaringan atas (suprastruktur), lantas bukan berarti memiliki peranan sentral dalam kehidupan seutuhnya. Sebab pada priode liberal dan setelahnya juga dapat dikatakan sebagai epos kapitalisasi, sehingga determanisasi ekonomi menjadi alasan utama mengapa jaringan atas tidak memiliki peran dominan.⁸⁴ Pada ahirnya struktur semacam ini terus berjalan sekalipun terdapat banyak kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, karena pada prinsipnya basis ekonomilah yang mampu memonopli aktifitas mutlak masyarakat. Tidak hayal apabila Probolinggo sebagai daerah yang dipenuhi ladang produksi, kesenjangan masih menjadi suatu keniscayaan bagi masyarakat.

⁸³ Jones, Bradbury, and Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, 53-64.

⁸⁴ George Ritzer, *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pusaribu, Rh. Widada, and Eka Adinugraha (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 93.

Untuk itu terdapat segmen penting yang menjadi pembahasan pokok mengenai jaringan atas yang berada di wilayah non-produksi, yakni struktur kompleks sebagai sistem terorganisir untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan produksi. Oleh karena itu, terdapat muatan sederhana dalam pembahasan di Probolinggo mengenai jaringan atas yang telah dijelaskan.

A. Pemerintahan Kolonial dan Aktifitas Politik

Produk kebijakan juga dapat disimpulkan sebagai kerangka yang begitu memadai di jaringan atas, sehingga terdapat ide-ide terbaru secara langsung menjadi stimulus basis ekonomi.⁸⁵ Salah satunya adalah muatan kebijakan tentang administrasi pemerintahan yang mengalami pergeseran dari terpusat hingga kewenangan otonom. Dalam sejarah perkembangan ide politik yakni merujuk pada ketentuan otonomi daerah, yang menjadi satu rumpun kebijakan berpihak kepada kebutuhan modal swasta.

Probolinggo sebagai wilayah yang memiliki perubahan dalam pola administrasinya sejak abad 20. Kemudian dari beberapa wilayah administrasi yang menjadi pembahasan kali ini adalah, wilayah Probolinggo yang menjadi *Gemeente*. Sebab perubahan struktur dan berubahnya kebijakan pemerintahan kolonial, merupakan isu besar Hindia-Belanda. Lantas struktur perubahan yang ekstrim, menjadi penanda bagaimana pengaruh dan dominasi basis ekonomi dalam pemerintahan kolonial di era liberal.

Decentralisatie Wet 1903, setidaknya putusan ini merupakan pengantar untuk menuju pada sistem Desentralisasi, sekalipun pada

⁸⁵ Pip Jones, Liza Bradbury, and Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 52.

kenyataannya putusan ini dianggap sebuah ketidak pastian. Tetapi sekalipun para admintrator pusat dan beberapa pihak lainnya telah berada di zona nyaman dalam arena poliitik sentralisasi, namun segala upaya dan desakan tetap dilakukan oleh kaum borjuis. Hingga pada akhirnya tepat pada tahun 1905 pemerintahan di Hindia-Belanda mengundan-undangan *Decentralisatie Besluit* 1905, sebagai jawaban usaha beberapa kelompok pemodal yang sudah berkoloni atau tersusun menjadi sebuah komunitas untuk membuka ruang otonom kepada *gewesten* dan secara husus *gemeenten*.⁸⁶

Sekalipun pada dasarnya implementasi politik desentralisi pemerintahan kolomial di Hindia-Belanda hanya untuk menjawab tuntutan dari segolongan orang borjuis Belanda. Untuk mendapatkan akses husus meskipun menggunakan dalih dengan berkeinginan meringankan beban pihak pemerintahan.⁸⁷ Situasi ini kerap kali timbul dari beberapa pihak tertentu dan lebih husus kaum borjuis yang memiliki kepentingan di sektor produksi, terlepas dari sistem politik apapun yang dijalankan di era pra-kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam soal kepentingan dalam mengambil keuntungan, jaringan seperti ini tidak hanya sekelompok orang Eropa saja. Masalah ini, sudah seringkali terjadi di wilayah sub-ordinasi di Hindia-Belanda seperti para elit halnya, kaum priyayi dan kelas atas lainnya.⁸⁸

⁸⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, (Malang: 2004), 29.

⁸⁷ Wignjosoebroto, *Desentralisasi*, 34.

⁸⁸ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, Cet. 1, 1983) 57-95.

Keluarnya *Decentralisatie Besluit* 1905 beserta *Local Raden Ordonnantie* juga diikuti oleh penetapan beberapa kota besar yang sudah memenuhi standar untuk memiliki pemerintahan secara otonom, karena kota tersebut sejak awal udah menjadi titik urbanisasi di masa 19-an ahir dan 20-an awal. Kota-kota besar yang dimaksud antara lain Batavia, Jatinegara, dan Bogor dapat mengelola pemerintahan kota secara otonom pada tahun 1905. Satu tahun kemudian disusul oleh Surabaya, Pekalongan, Blitar, Magelang, Kediri, dan Bandung pada tahun 1906 dan ini kemudian disusul oleh kota-kota lain seperti Malang pada tahun 1914 dan tentu masih banyak lagi kota-kota lainnya.⁸⁹ Sedangkan Probolinggo sendiri ditetapkan menjadi *Gemeente* pada tahun 1918 bersamaan dengan kota kecil lainnya.⁹⁰

Fase penentuan tentang kelayakan suatu kota untuk mendapai status *gemeente*, secara sederhana dapat dilihat dua arah. *Pertama* pada umumnya adalah pusat keresidenan dan kota-kota besar, karena wilayah tersebut merupakan arena potensial untuk menunjang kebutuhan dan tentunya sebagai pusat-pusat pertumbuhan perekonomian serta sekaligus banyak ditempati oleh orang-orang Eropa.⁹¹ *Kedua*, wilayah ini biasanya terjadi pada kota-kota kecil di beberapa wilayah Hindia-Belanda dan khususnya Jawa. Yakni berdasarkan beberapa syarat sebagai pertimbangan agar komunitas Eropa dapat mengelola

⁸⁹ Purnawan Basunduro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 105-206.

⁹⁰ Ruli Muji Astutik and Septina Alrianingrum, “ *Gemeente* Probolinggo 1918-1926”, *Jurnal AVATARA*, Vol. 1, NO. 3, (Oktober 2013): 520.

⁹¹ Purnawan Basunduro, *Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012)*, (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmaterra Publishing, 2012) 7.

pemerintahan kota sendiri antara lain, keuangan, populasi penduduk, dan kondisi setempat.⁹²

Kemudian dapat dilihat bahwasanya kota-kota yang mendapatkan keistimewaan berupa otonomi, merupakan sebuah jaringan untuk memperoleh keuntungan besar dalam wilayah tersebut. Jaringan tersebut tercipta melalui suprastruktur sebagai instrumen yang berangkat dari poros keinginan beberapa pihak yang menjalankan modal. Maka dari itu, perkotaan merupakan sebuah representasi dari keinginan untuk mendapatkan akumulasi keuntungan. Realitas sosial seperti ini tidak dapat terelakkan oleh masyarakat yang terbentuk dalam tatanan ini, karena pada dasarnya terbentuknya tatanan sosial masyarakat terangsang oleh dominasi materia suprastruktur.

Probolinggo merupakan kota kecil yang betul-betul potensial untuk memenuhi kebutuhan produksi kolonial di Hindia-Belanda salah satunya adalah, wilayah ini sebagai wilayah *Hinterland*.⁹³ Salah satu faktor pemenuhan kebutuhan dalam produksi, dan tentunya situasi ini menjadikan Kota Probolinggo sebagai wilayah yang strategis di sektor ekonomi. Kemudian yang paling penting dalam putusan *Gemeente* Probolinggo yakni, memiliki populasi masyarakat yang memadai.

Pemerintahan di Hindia-Belanda yang telah mengimplementasikan kebijakan Desentralisasi, dan tentunya hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kalangan komunitas-komunitas Eropa khususnya Belanda di Hindia-Belanda ini. Bagaimanapun keinginan untuk memiliki pemerintahan

⁹² Ruli Muji Astutik and Septina Alrianingrum, “ *Geemente* Probolinggo 1918-1926”, *Jurnal AVATARA*, Vol. 1, NO. 3, (Oktober 2013): 521.

⁹³ Astutik and Alrianingrum, “ *Geemente* Probolinggo 1918-1926,” 521.

kota, merupakan keinginan komunitas Eropa dan lebih husunya adalah kaum borjuis swasta yang sudah sejak lama menjalankan modal di Hindia-Belanda.

Pemerintahan kota di Hindia-Belanda sejak diresmikannya untuk mengelola secara otonom sampai 1916, secara administratif masih dipimpin oleh Asisten Residen. Kemudian tepat pada tahun 1916, pemerintahan kota mulai dipimpin oleh Wali Kota (*burgemeester*). Kemudian pada tahun 1926, dikeluarkanlah putusan *Stadsgeemente Ordonnantie* yang memberikan otoritas penuh kepada pemerintahan kota dan ini berlaku pada pemerintahan kota di seluruh Jawa. Pada prinsipnya, *Gemeente* merupakan pemerintahan kota yang memiliki otoritas atau otonom terbatas dan sedangkan di priode 1926 menjadi otonomi penuh.⁹⁴

Begitu juga dengan Probolinggo yang diputuskan menjadi *Gemeente* pada tahun 1918 dengan alasan tertentu, dan pada mulanya akan dilihat secara potensial yang sekiranya layak. Alasan sederhana untuk menjawab itu adalah pada sifat dasarnya terletak pada orang-orang swasta yang menjalankan modal dan bahkan bangsa koloni itu sendiri, yang ingin mencapai tingkat efisiensi dalam urusan perekonomian.⁹⁵

Babak ini juga dalam analisis sederhana dari segala gejala-gejala dan segala peristiwa yang timbul, dari berahirnya kebijakan tanam paksa di Hindia-Belanda kala itu. Menjadi titik tolak yang sama sekali tidak jauh dari keinginan eksploitas bernilai ekonomi dan pada dasarnya, sepanjang upaya untuk membentuk sebuah tatanan baru di Hindia-Belanda yang ditandai

⁹⁴ Purnawan Basunduro, Pengantar Sejarah Kota (Yogyakarta: Ombak, 2012), 109.

⁹⁵ Basunduro, Pengantar, 111.

keinginan orang-orang pemodal swasta untuk mengahiri sistem sentralisasi di Hindia-Belanda. Karena hal itu dinilai sangat lamban dalam segala proses dan tindakan yang berhubungan dengan administrasi, kebijakan, dan lain-lainnya.

Pada dasarnya soal keputusan atau pemberian status otonom pada suatu wilayah merupakan suatu peristiwa krusial di dalam perkembangan prakemerdekaan Indonesia. Pada prinsipnya, perubahan ini tidak terjadi secara natural atau terjadi begitu saja. Namun terdapat pola-pola yang berubah akibat kebutuhan mendasar manusia (kebutuhan materia), dan perubahan seperti yang terjadi di Hindia-Belanda sejak masuknya VOC dan di awal abad 20-an sebagai salah satu monumen sejarah yang tidak bisa dielakkan.

Oleh karena itu, Kota Probolinggo merupakan suatu wilayah Istimewa yang kelak menjadi kantong-kantong ekonomi pemodal atau yang memiliki kekuatan dalam wilayah produksi. Maka daerah ini mendapatkan persetujuan untuk membentuk dan mengelola pemerintahan kota secara otonom, baik *Gemeente* (1918-1926) maupun *Stadgemeente* (1926-1942).⁹⁶

Sejak awal dengan adanya upaya mendapatkan kekuatan otonomi pemerintahan, yang terjadi di daerah ataupun kotapraja. Merupakan sebagai gerak dari keinginan komunitas borjuis Eropa dan khususnya Belanda untuk menciptakan menjalankan sebuah sistem dalam konstalasi kepentingan mereka, untuk pemenuhan kebutuhan (ekonomi) dalam produksi sebagai dasar penggerak. Karena pada dasarnya, golongan tersebut menilai pemerintahan bersifat sentralistis yang tidak lagi efisien dalam menangani

⁹⁶ Basunduro, Pengantar, 110-111.

kegilaan kaum pemodal dalam sektor produksi (basis struktur) dan urusan lainnya. Situasi ini merupakan keniscayaan dalam segala upaya yang terjadi di Hindia-Belanda, hususnya keputusan-keputusan yang diproduksi oleh suprastruktur, yang hanya berdasarkan atau berangkat dari pengkristalan dari basis struktur. Sehingga realitas yang terjadi pada masyarakat Kota Probolinggo atas putusan untuk mengelola pemerintahan kota secara otonom sebagai bentukan dari kehendak basis ekonomi.

Bagaimanapun soal pemerintahan otonom perkotaan di Hindia-Belanda yang dimulai sejak keluarnya putusan *Desentralisasi Wet* 1905, dalam perjalanannya terdapat polemik untuk menjalankan pemerintahan tersebut. Masalah ini salah satunya yang begitu penting untuk menjalankan pemerintahan otonom tersebut salah pendanaan⁹⁷ dan tenaga kerja,⁹⁸ bagaimanapun dua hal ini adalah sesuatu yang krusial. Soal pendanaan, pemerintahan pusat memberikan modal awal untuk membiayai kebutuhan dalam pemerintahan kota. Misalnya Kota Surabaya pada awal karir pemerintahan otonom, pemerintahan pusat Hindia-Belanda memberikan anggaran awal untuk kebutuhan oprasional dan lain sebagainya sebesar F 284.300.⁹⁹ Demikian pula di Kota Probolinggo sejak disandangkan status

⁹⁷ Purnawan Basunduro, *Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012)*, (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmatara Publishing, 2012), 14.

⁹⁸ Trio Eka Mayshurah and Sri Mastuti Perwaningsih, "Perkembangan Pendidikan Kolonial di *Geemete* Probolinggo Tahun 1918-1942", *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 2 (2011): 4.

⁹⁹ Purnawan Basunduro, *Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012)*, (Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmatara Publishing, 2012), 14.

Gemeente, pemerintahan tersebut juga menerima modal awal sebagai dana operasional, program, pembangunan, dan lain sebagainya.

Kota Probolinggo yang ditetapkan menjadi *Gemeente* pada tahun 1918,¹⁰⁰ namun pada awal mulanya masih dipimpin oleh Asisten residen. Kemudian seiring berjalannya waktu Kota Probolinggo mulai dipimpin oleh *Burgeemester* (Wali Kota) pada tahun 1928 kemudian dipimpin oleh Ferdinand Edmond Meijer.¹⁰¹ Pada priode kolonial ini, pemerintahan di Kota Probolinggo hanya pernah mengalami 3 priode pemimpin yang berbeda.

Pemerintahan kota yang masih belum memiliki otonomi penuh yang pada mulanya masih dimodali oleh pemerintahan pusat.¹⁰² Dalam urusan ini, pemerintah kota ini dibebani oleh beberapa hal yakni, yang berurusan dengan keuangan, dan beberapa hal yang menjadi suatu kewajiban antara lain, urusan jalan-jalan umum perkotaan (Pembuatan, perbaikan, dan perawatan) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jalan-jalan umum, baik itu hal-hal yang bernilai estetika maupun sesuatu yang memang dibutuhkan. Kemudian juga bertanggung jawab dalam soal kebakaran dan juga dibebani penyediaan alat-alat untuk pemadaman tersebut.¹⁰³

Kemudian dalam beberapa tahun kemudian terdapat perubahan dalam sistem pemerintahan perkotaan, semenjak keluarnya putusan *Stadsgemeente Ordonnantie* yang tertuang dalam *Staatblad No. 365*. Semenjak itu

¹⁰⁰ Ruli Muji Astutik and Septina Alrianingrum, “*Gemeente Probolinggo 1918-1926*”, *jurnal AVATARA*, No. 01, Vol. 03, (Oktober: 2013): 520.

¹⁰¹ Achmad Budiman Suharjono, “Wali Kota Pertama Probolinggo”, pada 20 Mei 2022, <https://m.liramedia.co.id/read/walikota-pertama-probolinggo>

¹⁰² Purnawan Basunduro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 108.

¹⁰³ Basunduro, *Pengantar*, 108.

pemerintahan kota di seluruh Jawa pada 1926 mengalami perubahan yang cukup signifikan, dengan ini Kota Probolinggo dan kota-kota lainnya diberikan kewenangan secara utuh untuk mengelola pemerintahan kota.¹⁰⁴

Dalam wilayah ini, seringkali mengalami suatu perdebatan pelik untuk mengurai suatu objek persoalan. Namun pada era paham liberal yang juga membentuk pola perekonomian di setiap arena sosial, kita dapat memetakan secara sederhana untuk melihat suatu kondisi dalam pengkajian sejarah untuk membahas keadaan sosial masyarakat setempat. Ketika membicarakan soal kota bukan hanya wujud pemerintahan saja sebagai manifestasi suprastruktur, namun terdapat beberapa instrument lainnya seperti Pendidikan, dan lain-lain sebagai pemenuhan kebutuhan Produksi.

Pada prinsipnya jaringan kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat selalu didasari satu faktor yakni kepentingan materi, yang terus mengalami pertentangan sehingga menciptakan institusi masyarakat seperti agama, pemerintahan, Pendidikan, dan lainnya. Namun pada intinya, arah dari segala lini kehidupan masyarakat akan bermuara pada proses eksploitasi oleh segelintir orang yang memiliki modal atau alat produksi. Peristiwa ini sudah diperlihatkan oleh alasan *Desentralisasi Wet* 1905 sebagai manifestasi kepentingan kelompok pemodal, dan kasus ini tidak hanya menjadi sarana dan prasarana pemodal Eropa saja, bahkan pejabat lokal (Bupati, Dewan, DLL), kaum elit, dan terdapat pihak lain yang juga ikut serta pada proses ini.

¹⁰⁴ Purnawan Basunduro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2012), 109-11.

Masyarakat dalam wilayah suprastruktur dalam kehidupan sosial di Probolinggo terdiri dari dua poros yang saling bersentuhan, yakni sebagai kelembangaan atau instansi yang bergerak dalam masyarakat dan kesadaran kolektif. Namun kemudian kesadaran kolektif yang ada pada masyarakat, muncul dari satu alasan yakni materi. Kesadaran kolektif ini seringkali menjadi suatu narasi yang membentuk tindakan sosial masyarakat, entah itu berujung pada satu prinsip perjuangan atau berujung pada prinsip mengafirmasi hegemoni penguasa.

Sekalipun pada konteks ini, suprastruktur berada di luar wilayah basis struktur. Namun apapun yang terjadi pada kehidupan dan kesadaran sosial yang membentuk adalah rangsangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup atau rangsangan material. Sehingga pada prinsip yang satu, kekuatan modal dan hegemoni ekonomi seringkali menjadi kekuatan untuk menciptakan sistem sosial. Maka dari itu, suprastruktur pada kehidupan sosial Probolinggo ini adalah wilayah yang begitu rentan terjadi suatu pemisahan secara signifikan dalam lapisan-lapisan masyarakat. Sehingga jaringan sosial masyarakat tidak lepas dari kendali maupun hegemoni secara langsung maupun tidak oleh kaum borjuasi, yang sejatinya sebagai kekuatan modal dan produksi.

Kerentanan ini, juga dipengaruhi oleh beberapa institusi sosial yang menyeret kesadaran masyarakat umum sebagai komoditas kapital. Baik secara hubungan dalam wilayah basis dan suprastruktur, sebagai komoditas pasar. Seiring berjalannya perkembangan kehidupan sosial

masyarakat Kota Probolinggo, tidak terlepas jalinan kental yang berujung pada eksploitasi pada pribadi maupun kelompok masyarakat tertentu.

B. Pendidikan Kolonial

Pendidikan di Hindia-Belanda di abad 20-an awal, merupakan suatu upaya untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang akan digunakan untuk mengisi pos-pos produksi bahkan di area suprastruktur lapisan masyarakat. Sehingga taraf pendidikan ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah progres besar untuk memajukan taraf masyarakat yang dijajah oleh pemerintahan Belanda, sehingga realitas yang terjadi pada masyarakat sangat persejangan dengan politik etik yang diumumkan oleh pihak Kerajaan Belanda atas tanah jajahannya. Terlebih lagi terdapat masalah lain yang muncul dalam koridor pendidikan ini, persoalan ini merupakan sebuah anomali yang mencoba menyisihkan masyarakat lapisan bawah pada situasi rasial. Anomali ini tidak muncul secara natural, tetapi pada prinsip anomali tersebut muncul atas hegemoni dan propaganda pihak superior.

Kemudian di Kota Probolinggo terdapat pemisah yang cukup lebar berdasarkan status sosial mereka, sehingga secara jelas memperlihatkan bahwasanya penancangan memajukan taraf pendidikan masyarakat setempat masih cukup jauh dari kenyataan. Jauh dari hal ini, memang pada dasarnya pendidikan di zaman kolonial Kota Probolinggo pada tahun 1918-1942 hanya sebagai wadah untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pekerja yang kopten dan tentu juga murah. Sesuatu yang cukup marak terjadi di Hindia-Belanda dan khususnya kota-kota kecil sebagai ladang eksploitasi secara berkelanjutan.

Karena watak dari kapitalisme (Pemilik Produksi dan jaringan basis) itu sendiri, melakukan kegiatan akumulasi profit secara besar-besaran dan membayar para pekerja dengan murah.

Keniscayaan tersebut, karena adanya pendidikan kolonial merupakan sebuah institusi untuk membentuk kesadaran masyarakat. Bahkan yang terjadi didalamnya, seperti sikap rasial kepada etnis tertentu merupakan ide yang terkandung dalam suprastruktur. Fakta tersebut karena sudut pandang tentang pembentukan kesadaran dalam pendidikan dan sikap rasial terbut, merupakan sebuah rangsangan realitas material dan kekuatan basis struktur dalam membentuk karekter serta kesadaran masyarakat. Teteapi ada sesuatu yang mencolok dalam realitas suprastruktur kehidupan sosial Kota Probolinggo, pada masa penjajahan kolonial Belanda 1918-1942. Bahawasanya pendidikan kolonial (Bagia Suprastruktur) masih menyimpan sebuah kontradiksi besar yang berujung pada pemisahan secara ekstrim, salah satunya adalah lembaga pendidikan sebagai berikut.

1. *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) 1900.

Pendidikan di Kota Probolinggo terbilang cukup masif sebagai intitusi sosial masyarakat, berbeda dengan wilayah kota kecil lainnya.

Pendidikan di Kota Probolinggo dalam program untuk mempersiapkan tenaga kerja yang mengisi pos pemerintahan sebagai tatanan Institusional adalah *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA).¹⁰⁵

¹⁰⁵ Trio Eka Mayshurah and Sri Mastuti Perwaningsih, "Perkembangan Pendidikan Kolonial di *Geemente* Probolinggo Tahhun 1918-1942", dalam *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 2 (2011): 8

Dulunya sekolah kepegawaian ini bernama *Hoofden School*,¹⁰⁶ kemudian pada tahun 1900 berubah menjadi OSVIA bersamaan dengan Bandung dan Magelang.¹⁰⁷

OSVIA sebagai lembaga pendidikan yang menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, ini juga berlaku untuk seluruh pendidikan kolonial. Pendidikan ini juga sangat diminati oleh kalangan elit lokal, bahkan di Probolinggo sendiri juga memiliki peserta didik yang cukup banyak.



Gambar 3.1 Diklat Pegawai Negeri Sipil dan Kunjungan Siswa OSVIA Probolinggo ke Surabaya.

(Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1923)

OSVIA sendiri adalah lembaga pendidikan yang disiapkan untuk mencetak tenaga berketerampilan dari penduduk lokal, sebagai tenaga

¹⁰⁶ Ini Tanjung Tani and Widya Lestari Ningsih, “Sejarah Osvia, Sekolah PNS Zaman Hindia Belanda”, dalam, <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/12/110000379/sejarah-osvia-sekolah-pns-zaman-hindia-belanda?page=all>

¹⁰⁷ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Drs. Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 109.

pekerja di wilayah pemerintahan. Sekalipun pendidikan ini diperuntukkan untuk masyarakat lokal, dan ongkos untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut juga disesuaikan dengan penghasilan, pada nyatanya hal ini juga menimbulkan sebuah masalah lain. Permasalahannya terletak kemampuan ekonomis masyarakat kolektif, sehingga pendidikan di OSVIA hanya dapat diakses oleh kaum elit lokal, priyai, dan pegawai kolonial.¹⁰⁸

2. *Hollandsche Chinesseche School*

CCS (*Hollandsche Chinesseche School*) sekoalah bikinan kolonial ini, merupakan sekolah yang diperuntuk untuk orang Cina. Sebagai respon perkembangan etnis Tiongkok di wilayah Probolinggo,¹⁰⁹ bahkan di Kota Probolinggo sendiri juga memiliki populasi yang cukup besar. Pendidikan yang dihusukan untuk etnis Tiongkok ini, dalam kegiatan kelasnya menggunakan Bahasa Nasional Tiongkok sebagai bahasa pengantar.¹¹⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁸ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Drs. Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 109-110.

¹⁰⁹ Tiyo Eka Mayshuroh and Adus Sair, “Stratifikasi Sosial dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda”, dalam *Jurnal Urban Sociology*, Vol. 6, No. 1 (tahun 2023): 8

¹¹⁰ Mayshurah and Sair, “Perkembangan Pendidikan,” 8-9.



Gambar 3.2 Hollandsche Chinesse School di Probolinggo
(Sumber: Koleksi Arsip Kota Probolinggo, dalam Trio Eka Mayshurah, Sri Mastuti Perwaningsih 2011).

3. ELS (*Europeesche Lagere School*)

Sekolah yang bergaya Eropa ini terbilang sangat digandrungi oleh komunitas Eropa dan tentu beberapa kalangan orang elit lokal maupun orang kaya lainnya, Probolinggo juga memiliki ELS yang dibikin oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Sesuai namanya, sekolah ini diperuntukkan untuk orang Eropa. Namun juga menerima beberapa peserta didik dari kalangan elit saja, sebut saja kaum priyai, Bupati, dan pejabat lainnya.¹¹¹ Tentu saja dalam proses belajarnya, para siswa menggunakan Bahasa Belanda sebagai Bahasa pegantar.

Dapat dikatakan ELS merupakan lembaga pendidikan yang lebih populer dari OSVIA, alasan ini karena siswa OSVIA hanya memiliki

¹¹¹ Tiyo Eka Mayshuroh and Adus Sair, "Stratifikasi Sosial dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda", *Jurnal Urban Sociology*, Vol. 6, No. 1 (tahun 2023), 7.

jenjang karir yang sempit dan tentu sangat berbeda dengan ELS. Jika lulusan OSVIA hanya mengarah kepada kepegawaian saja, maka lulusan dari ELS memiliki banyak pilihan karir, dan tentu masuk pada kepegawaian pemerintahan juga bisa.¹¹²

4. Sokolah Desa dan Sekolah rakyat

Sekolah Desa (*Schakelschool*) dan Sekolah Rakyat (*Volkschool*) merupakan lembaga pendidikan yang disediakan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk penduduk lokal. Sekolah Desa merupakan lembaga pendidikan yang ditujukan untuk memberantas buta huruf dalam masyarakat. Dalam laporan sensus 1929/1930 terdapat 7596 peserta didik. Lembaga pendidikan ini memiliki focus untuk mengatasi masalah butu huruf, maka tidak hayal jika diajari membaca dan menghitung.¹¹³ Kemudian sekolah Rakyat, yang memiliki tujuan untuk mengakomodir anak-anak lokal yang tidak memiliki kesempatan belajar di sekolah lainnya.¹¹⁴

5. Sekolah Ongko Loro

Voll. 2e kl. School (Ongko Loro) merupakan lembaga pendidikan di zaman kolonial yang ada di Probolinggo, lembaga ini dapat dibilang sebagai pendidikan rendah. Untuk bahasa pengantarnya sekolah ini

¹¹² Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 110.

¹¹³ Trio Eka Mayshurah and Sri Mastuti Perwaningsih, “Perkembangan Pendidikan Kolonial di *Geemete* Probolinggo Tahun 1918-1942”, dalam *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 2 (2011): 9.

¹¹⁴ Tiyo Eka Mayshuroh and Adus Sair, “Stratifikasi Sosial dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda”, *Jurnal Urban Sociology*, Vol. 6, No. 1 (tahun 2023): 8.

menggunakan Bahasa Melayu, namun sebelumnya bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa daerah (Ibu). Sekolah ini dicanangkan untuk mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja, tentunya sebagai tenaga kerja rendah yang berada di pos kepegawaian dalam sektor industri dan pemerintahan.

6. Sekolah lanjutan

Adanya Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) ini, sebagai lembaga pendidikan yang menjadi lembaga lanjutan untuk Sekolah Desa. Namun sekolah ini terbilang tidak terlalu populer, sehingga tidak terlalu digandrungi. Kurikulum yang ditawarkan tidak terlalu jauh dari Sekolah Desa yakni menghitung, membaca, dan menulis.¹¹⁵

Terdapat 7 lembaga pendidikan ini secara mencolok menjadi isu kompleks dalam pengaruh basis, wacana ini terhubung pada suatu narasi yang cukup untuk melihat betapa besarnya pola pemisahan secara rasial.¹¹⁶ Karena sejak awal pemerintahan Hindia-Belanda menjalankan politik etis pada dasarnya terdapat desakan-desakan yang mengatas namakan kepentingan penduduk lokal.¹¹⁷ Desakan dan kritikan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menginginkan kemajuan untuk penduduk lokal diantaranya L. Vitalis (Inspektur Pertanian), dr. W. Bosch

¹¹⁵Trio Eka Mayshurah and Sri Mastuti Perwaningsih, “Perkembangan Pendidikan Kolonial di *Geemente* Probolinggo Tahun 1918-1942”, dalam *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 2 (2011): 9.

¹¹⁶ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Drs. Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 109

¹¹⁷ Kompas, “Politik Etis: Tokoh, Pengertian, dan Latar Belakang”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/120555078/politik-etis-tokoh-pengertian-latar-belakang-dan-dampak?page=all>

(Dinas Kesehatan), dan pendeta yang nantinya menjadi bagian dari parlemen W. R. Baron van Hoevell.¹¹⁸

Namun tidak dapat dipungkiri, adanya pendidikan kolonial sekaligus menjadi martir untuk pendudu lokal yang kemudian memacu gerakan-gerakan intelektual. Namun pada aspek lain, pendidikan kolonial masih memberikan rangsang simbolik kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga pendidikan kolonial tidak hanya menjadi institusi suprastruktural saja, lebih dari itu pendidikan kolonial menjadi pemantik kesadaran masyarakat yang membentuk kesadaran kolektif. Tidak hayal jika saat-saat tertentu pendidikan kolonial sekaligus menjadi pemisah antar kelas sosial.

Arena sosial dalam diskursus pola pemisahan dan diskriminasi antara kelas sosial tertentu yang terjadi pada pendidikan kolonial di Kota Probolinggo, tentunya didasari oleh kekuatan material ekonomi. Bagaian awalnya secara kelembagaan semuanya memang memiliki sesuatu yang berbeda, seperti ELS yang memiliki prestis lebih tinggi ketimbang OSVIA. Alhasil dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, menjadi terpolarisasi berdasarkan kekuatan materi (ekonomi) dan status lembaga pendidikan. Dalam hal ini kekuatan materi (Ekonomi) menjadi modal dasar yang membentuk kesadaran masyarakat, baik kesadaran kolektif maupun yang terjadi di dalam institusional suprastruktur. Wajar saja apabila pendidikan kolonial bagi penduduk lokal menjadi begitu besar,

¹¹⁸ Gusti Muhammad Prayudi and Dewi Salindari, "Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda di Surabaya Pada Tahun 1901-1942", *Jurnal Publika Budaya*, Vol. 1, No. 3 (Maret, 2015): 22.

karena kemampuan dan kesempatan untuk masuk ke OSVIA dan ELS misalnya, hanya untuk kalangan Eropa, Pejabat Pemerintahan (Baik Lokal maupun Eropa), Bangsawan, dan orang kaya lainnya.¹¹⁹

Hal dilematis lagi dari perkembangan pendidikan kolonial yang disisi lain masih terlihat bualan semata, yakni adanya pendidikan seperti Ongko Loro. Lembaga pendidikan yang menjadi institusi untuk menghasilkan pekerja di wilayah *basis* dan institusional-suprastruktur, mirisnya lembaga ini dibikin untuk mendapatkan tenaga pkerja rendahan. Dapat dibilang rengdah, dikarenakan dalam wilayah *basis* berada di kelas rendahan, sedangkan diwilayah suprastruktur menjadi sekawanan yang berada dibawah otoritas kekuatan material.¹²⁰



¹¹⁹ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, terj. Sunarto, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 109.

¹²⁰ Tiyo Eka Mayshuroh and Adus Sair, “Stratifikasi Sosial dalam Pendidikan di Probolinggo Pada Era Kolonial Belanda”, *Jurnal Urban Sociology*, Vol. 6, No. 1 (Tahun 2023): 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam periode 1918–1942, ekonomi sosial Probolinggo mengalami kapitalisasi borjuasi yang sistematis. Karena lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi kaum borjuis pada saat itu Hal ini merupakan fenomena saat ekonomi liberal dimulai di Hindia, terutama dengan populasi komoditas yang sangat besar. Sebuah sensus tahun 1920 menunjukkan bahwa Probolinggo adalah wilayah dengan populasi terbesar di Jawa bagian timur, menempati posisi ke-4 setelah Surabaya, Mojokerto, dan Malang. Jumlah penduduk yang tercatat adalah sekitar 765.546 orang, terdiri dari berbagai etnis: Timur Asing 5.962, Lokal 757.555, dan Eropa 2.029.

Selanjutnya, jelas bahwa aktivitas produksi seperti ekspor termasuk dalam aktivitas ekonomi. Kegiatan ini kemudian menjadi tolak ukur laju monopoli perekonomian, dengan begitu juga membentuk masyarakat di dunia kapital Probolinggo. Namun dari pesatnya aktifitas ini, terdapat pola-pola dominan dari kaum borjuasi, sedangkan kaum proletar menjadi komunitas mayor yang paling dirugikan.

Lantas pada tahun 1918-1942 terdapat sampel modal kapitalis yang tercantum dalam tulisan ini, seperti halnya pabrik Oemboel yang terus melakukan Produksi masal. Kemudian aktifitas kehidupan Probolinggo yang semakin mengarah pada tahap modern, menjadikan kebutuhan-kebutuhan

masyarakat setempat semakin kompleks. Sehingga terdapat penyediaan jasa transportasi seperti kereta api, term, dan kendaraan darat milik Ali Karman.

Berbicara basis tentunya juga terdapat hubungan kelas yang pasti di dalamnya, di antaranya adalah kaum borjuis dan proletariat Probolinggo. Tentu saja dalam corak kehidupannya sangat berbeda, seperti pemilik Pabrik Ooemboel yang menikmati surplus sedangkan buruh hanya sanggup dan kadang tidak sanggup untuk menyambung hidup hari perhari.

Sisi lain dari fenomena sosial lainnya, adanya aktifitas ekonomi di basis, terdapat hukum kausal yang pasti seperti terciptanya jaringan suprastruktur untuk menunjang kebutuhan produksi. Masyarakat dalam kekuasaan kapital lantas tidak lepas dari kerakusan pelaku, dan cara-cara jitu untuk mendapatkan surplus kemudian menciptakan jaringan atas seperti, pemerintahan otonom dan ide politiknya 1918-1942, pendidikan, dan komoditas pasar.

B. Saran

Setelah penyusunan dan penelitian skripsi ini selesai, ada beberapa saran yang ingin diberikan untuk penelitian lanjutan tentang perkembangan pemakaian kebaya, di antaranya:

1. Diharapkan ada penelitian yang lebih mendalam tentang ekonomi sosial di Probolinggo;
2. Diharapkan ada penelitian yang lebih menyoal ekonomi sosial dari masa ke masa.

Namun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis mereka yang berjudul “EKONOMI SOSIAL DI PROBOLINGGO 1918-1942.” Penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Boediono, Ekonomi Indonesia: dalam Lintas Sejarah. Bandung: PT. Mizaman Pustaka, 2016.
- Basundoro, Soetandyo, Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012). Yogyakarta: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Elmatera Publishing, 2012.
- Basundoro, Soetandyo. Soetandyo Pengantar Sejarah Ekonomi Perkotaan Indonesia. Jakarta: KENCANA, 2023.
- Edisi Pemutakhiran, Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Jones, Pip. Bradbury, Liza, and Boutillier, Shaun Le, *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Terjemahan oleh Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Kartodirdjo, Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Ritzer Boutillier, *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Terjemahan oleh Saut Pusaribu, Rh. Widada dan Eka Adinugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan oleh Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2016.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terjemahan oleh Tim Penerbit Serambi Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2008.
- Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Terjemahan oleh Suarto. Jakarta : Sinar Harapan, 1983
- Wignjosoebroto, Soetandyo, Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940). Cet. 1 Malang, 2004.

B. Jurnal Cetak

- Aprilia, Alfa Tirza. Irawan, Hendi and Santosa, Yusuf Budi Prasetya. "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia-Belanda 1830-1870," *Jurnal of Social Sciences & Humanites "Estoria" Universitas Indraprasta PGRI*, Vol. 1, NO. 2 (April 2021): 123.
- Dewi, Vira Maulisa. Hartanto, Wiwin and Puji, Rully Putri Nirmala. "Pangeran Diponegoro Dalam Perang Jawa 1825-1830," *Jurnal SIDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2020): 151.
- Firmandani, Iqbal Hastri and Trilaksana, Agus. "Perkembangan Transportasi Darat (BUS) di Probolinggo Tahun 1933-1956," *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 3, (2021).
- Kurniawan, Hendra. "Dampak Sistem Tanam Paksa Terhadap Dinamika Petani Jawa 1830-1870," *Jurnal SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11, No 2 (September 2014): 166.
- Kambali, Muhammad and Peemikitan Karl Marx tentang Struktur Masyarakat (Dialektika Infrastruktur dan Suprastruktur), *Jurnal AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (Juli 2020), 145.
- Mayshurah, Trio Eka and Perwaningsih, Sri Mastuti. "Perkembangan Pendidikan Kolonial di Geemete Probolinggo Tahhun 1918-1942", dalam *Jurnal AVATARA*, Vol. 11, No. 2 (2011): 4
- Maulana, Afif and Handayani, Sri Ana. Krisnadi, IG. "History of Gemeente Probolinggo", *jurnal historica*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2023)
- Nuryadi. "Gambaran Imperialisasi dan Kolonialisasi di Pulau Jawa Abad-19 dalam Travel Writing: A Visit to Java Karya Williyam Basil Worsfold", *Jurnal DEIKIS-Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2017): 96-102.
- Prayudi, Gusti Muhammad and Salindari, Dewi. "Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda di Surabaya Pada Tahun 1901-1942", *Jurnal Publika Budaya*, Vol. 1, No. 3, (Maret, 2015): 22.
- Susilo, Agus Sarkowi. "The Effect Of Cultuurstelsel Politics On Indonesia Community Development," *Jurnal SWADESI: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, Vol.1, No. 1 (2020):19.
- Zakia, Ardiva. Adisti, Asri Ayu and Asmarani, Aulia. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelas Sosial: Gaya Hidup, Daya Beli dan Tingkat

Konumsi”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 3, No. 5, (Mei 2022): 455.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Jurnal Online

Dewi Mutiara Triesca, *Suikersyndicaat Hindia Belanda 1870 – 1941*, Dalam Jurnal AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol. 4, No. 3 (Oktober 2016), 660, (<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/15602>)

D. Artikel Media Oneline

Achmad Budiman Suharjono, “Wali Kota Pertama Probolinggo”, pada 20 Mei 2022, <https://m.liramedia.co.id/read/walikota-pertama-probolinggo>

Ini Tanjung Tani, Widya Lestari Ningsih, “Sejarah Osvia, Sekolah PNS Zaman HIndia Belanda”, dalam, <https://www.kompas.com/stori/read/2024/03/12/110000379/sejarah-osvia-sekolah-pns-zaman-hindia-belanda?page=all>

Kompas, “Politik Etis: Tokoh, Pengertian, dan Latar Belakang”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/120555078/politik-etis-tokoh-pengertian-latar-belakang-dan-dampak?page=all>

Kompas, “Dampak Kolonialisme Belanda di Bidang Sosial”, diakses pada 30 April 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/20/100000179/dampak-kolonialisme-belanda-di-bidang-sosial?page=all>

Fandy, “Pengertian VOC, Sejarah, dan Tujuan Pembentukannya”, diakses pada 30 Mei 2024, https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-voc/#google_vignette

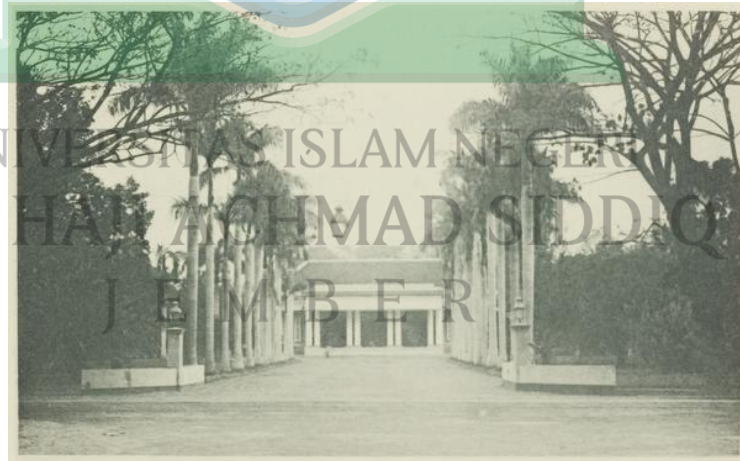
Ronihalim, “Alexander MacNeill: Kisah "Crazy Rich" Pemilik Pabrik Gula Oemboel di Probolinggo”, diakses pada 23 November 2024, <https://probolinggo.inews.id/read/437207/alexander-macneill-kisah-crazy-rich-pemilik-pabrik-gula-oemboel-di-probolinggo>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar Lampiran 1. Kawasan Eropa di Probolinggo

(Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1930,
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/911317?solr_nav%5Bid%5D=25b0944acb9922673362&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=5)



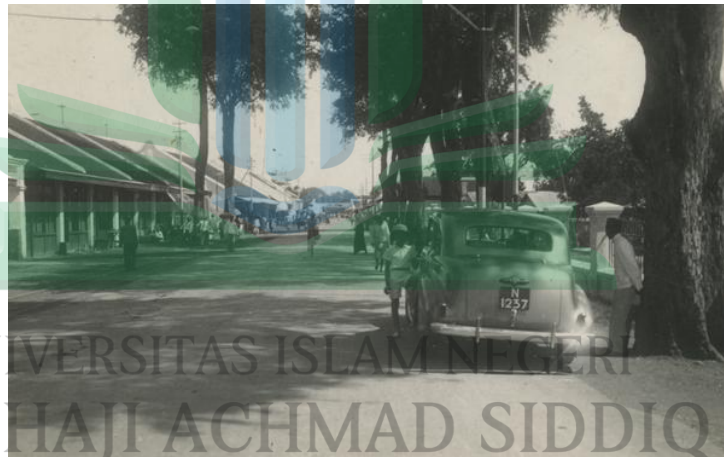
Gambar Lampiran 2. Rumah Asisten Residen

(Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1930,
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/907994?solr_nav%5Bid%5D=25b0944acb9922673362&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=5)



Gambar Lampian 3. Stasiun kereta api Perusahaan Stoomtram
Maatschappij (PbSM)

(Sumber: : Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1930
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/909409?solr_nav%5Bid%5D=25b0944acb9922673362&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=5)



Gambar Lampiran 4. Jalan di Probolinggo

(Sumber: Leiden *University Libraries Digital Collections*, 1939,
<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/imagecollection-kitlv>)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amam Swardi
NIM : 201104040003
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Instusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukang atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 November 2024

Saya yang Menyatakan



Amam Swardi

NIM 201104040003

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Amam Swardi
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 29 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : RT. 005 RW. 007, Dusun Margoayu, Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Brobolinggo.

B. Riwayat Pendidikan

RA : Ihyaul Islam
MI : Ihyaul Islam
MTs : Al-Amanah
MA : Al-Amanah

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sejarah dan Peradaban Islam Periode 2022-2023.
2. Ketua Komisi A SENAT FUAH Periode 2023-2024.